



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KEPANTOR GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024
Kepala Dinas Kesehatan DIY,



drg. PEMBAJUN SETYANINGSASTUTIE, M.Kes

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat”:

- Hasil capaian indikator diperoleh dari Indeks Keluarga Sehat (IKS) Wilayah dengan menghitung jumlah keluarga sehat dengan $IKS > 0,8$ dibagi jumlah keluarga pada tahun 2023 atau dengan rumus $IKS = \frac{\Sigma \text{Keluarga dengan } IKS > 0,8}{\Sigma \text{Keluarga}}$
- Nilai IKS merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator IKS, yaitu: 1) Penderita hipertensi yang berobat teratur, 2) Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan, 3) Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar, 4) Keluarga mengikuti program KB, 5) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 6) Keluarga sudah menjadi anggota JKN, 7) Bayi mendapatkan ASI Eksklusif, 8) Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih, 9) Pertumbuhan Balita dipantau, 10) Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan, 11) Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga, 12) Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja dari: 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dan; 5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 0,33 terealisasi 0,35 dihitung dari jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 sebesar 281.367 dibagi dengan jumlah keluarga di DIY sebesar 814.985. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,06%.
- Dibandingkan tahun 2022 capaian target IKS tahun 2023 mengalami kenaikan indeks sebesar 0,02 dari 0,31 menjadi 0,33. Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat” dengan IKS sebagai indikator kinerja baru ditetapkan pada tahun 2023 sesuai Renstra Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 - 2027.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:

- Hasil capaian indikator diperoleh dari evaluasi hasil penilaian reformasi birokrasi (RB) perangkat daerah yang menghasilkan kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 melaksanakan RB dengan kategori A atau 2, capaian tahun 2023 memperoleh kategori A atau 2. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Transformasi Sistem Kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan tahun 2023-2024. Transformasi Sistem Kesehatan mengamanatkan 6 (enam) pilar transformasi, meliputi: 1) Transformasi Layanan Primer, 2) Transformasi Layanan Rujukan, 3) Ketahanan Kesehatan, 4) Pembiayaan Kesehatan, 5) Sumber Daya Manusia Kesehatan, serta 6) Teknologi Kesehatan. Enam pilar ini diharapkan dapat diimplementasikan pada level daerah sehingga perlu disusun perencanaan implementasinya di daerah. Dalam rangka implementasi kebijakan transformasi kesehatan, perlu dilakukan advokasi, pemetaan potensi daerah, serta karakter masyarakat pengguna layanan kesehatan sehingga memperoleh dukungan dan menjadi desain layanan kesehatan.
2. Status Pandemi COVID-19 secara resmi telah dicabut pada 21 Juni 2023 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari kedua aturan tersebut, Kemenkes kemudian menerbitkan Permenkes Nomor 23 tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19 di masa endemi yang mengatur beberapa substansi, antara lain mengenai promosi kesehatan, surveilans, manajemen klinis, vaksinasi COVID-19 dan pengelolaan limbah masa peralihan dari Pandemi menjadi Endemi. Kerja sama dan sinergi antar sektor, organisasi non pemerintah, swasta dan masyarakat terus dilakukan untukantisipasi eskalasi penyebaran dan meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan menangkal COVID-19 dan potensi munculnya penyakit *re-emerging* dan *new emerging*.
3. Integrasi layanan primer merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan pilar pertama dari Transformasi Sistem Kesehatan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer yang berfokus pada tiga hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui

pemantauan dengan *dashboard* situasi kesehatan per desa. Implementasi ILP diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan, seperti; kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, Germas, serta pengendalian obat dan makanan.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Kesehatan DIY mengikuti pelaksanaan reformasi pada level pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi tingkat perangkat daerah dan sekaligus menjadi pendukung agenda perubahan Reformasi birokrasi baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

Daftar Isi

Kata Pengantar	0
Ikhtisar Eksekutif	2
Daftar Isi	5
BAB I Pendahuluan	8
1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	8
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3. Isu-Isu Strategis	17
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	19
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	27
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	28
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	28
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	29
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
2.2. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	38
BAB III Akuntabilitas Kinerja	41
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	41
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	61
3.3. Efisiensi Anggaran	68
3.4. Inovasi	69
3.5. Lintas Sektor	71
BAB IV Penutup	108
3.1. Kesimpulan	108
3.2. Langkah Perbaikan Kinerja	111
L A M P I R A N	112

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Dinas Kesehatan DIY	19
Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	20
Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	20
Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	21
Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	21
Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	21
Tabel I. 7 Sarana-Prasarana Dinas Kesehatan	22
Tabel I. 8 Sarana-Prasarana BLKK	22
Tabel I. 9 Sarana-Prasarana Bapeljamkessos	23
Tabel I. 10 Sarana-Prasarana Bapelkes	23
Tabel I. 11 Sarana-Prasarana RS Paru Respira	24
Tabel I. 12 Sarana-Prasarana RS Jiwa Grhasia	24
Tabel I. 13 Anggaran Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023	25
Tabel I. 14 Anggaran RS Jiwa Grhasia Tahun 2023	25
Tabel I. 15 Anggaran RS Paru Respira Tahun 2023	26
Tabel I. 16 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	27
Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan DIY, 2023-2026	28
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan	29
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 1 dan 2 Tahun 2023 Dinas Kesehatan	30
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023	36
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023	37
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023	41
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	42
Tabel III. 4 Rekapitulasi Indeks Keluarga Sehat Provinsi Tahun 2023	43
Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	44
Tabel III. 6 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1	45
Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2	52
Tabel III. 8 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah	52
Tabel III. 9 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023	53
Tabel III. 10 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	55
Tabel III. 11 Jumlah Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	57
Tabel III. 12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	57
Tabel III. 13 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2	58
Tabel III. 14 Target dan Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2023	62
Tabel III. 15 Kontribusi Sasaran Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	64
Tabel III. 16 Kontribusi Program Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah Tahun 2023	65
Tabel III. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	68
Tabel III. 18 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kesehatan DIY	73

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja	9
Gambar I. 2 Struktur Organisasi	10
Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kesehatan DIY	11
Gambar I. 4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BLKK	13
Gambar I. 5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bapeljamkessos	13
Gambar I. 6 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bapelkes	14
Gambar I. 7 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi RS Paru Respira	15
Gambar I. 8 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi RS Jiwa Grhasia	16
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP	38
Gambar II. 2 Website dan Instagram	38
Gambar II. 3 SIMKIA	39
Gambar II. 4 Mobscreen	39
Gambar II. 5 SEMAR SEHAT	39
Gambar II. 6 Website Kesga	40
Gambar III. 1 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Tahun 2023	60

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

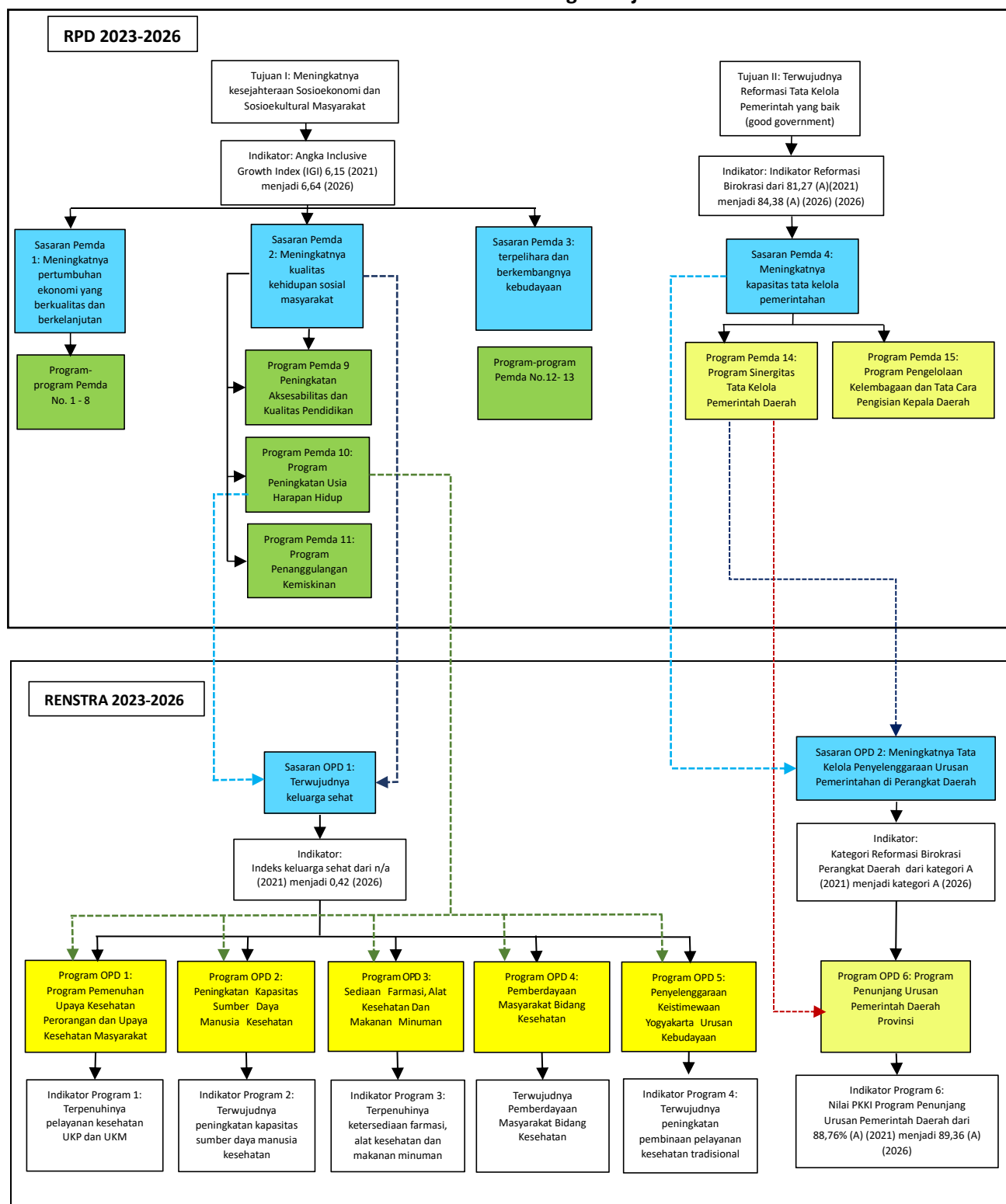
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Dinas Kesehatan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

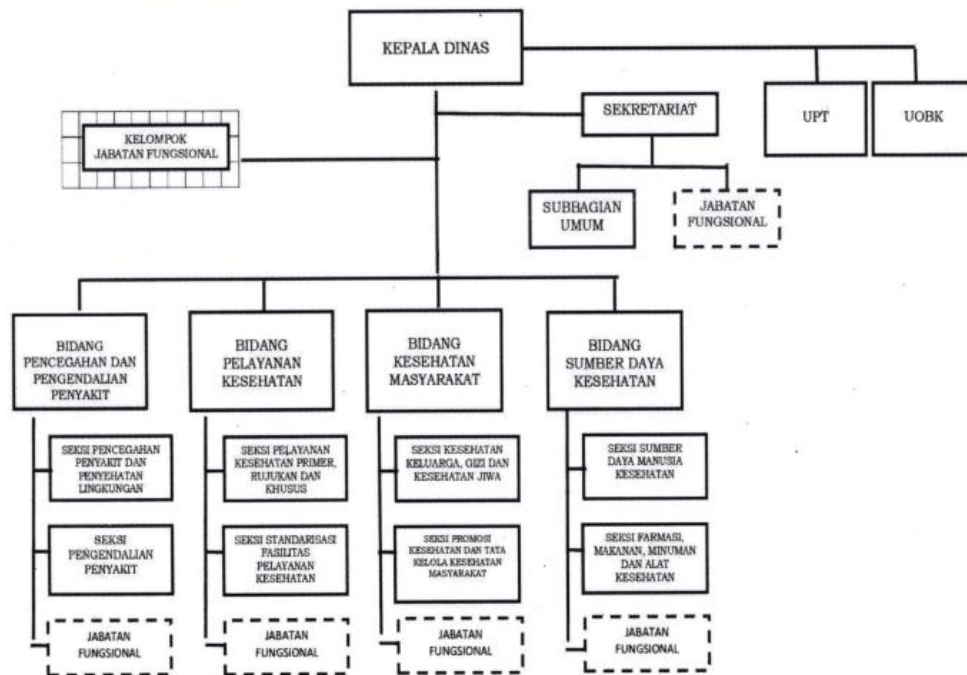
Gambar I. 1 Cascading Kinerja



Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Dinas Kesehatan DIY 2023-2026

Gambar I. 2 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Dinas Kesehatan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I. 3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Kesehatan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
3. penyelenggaraan pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit;
4. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan kesehatan khusus, standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
5. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
6. pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
7. pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan;
8. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
9. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan kabupaten/kota;
10. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
12. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
13. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Dinas;
16. pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
17. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
18. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY fungsi Dinas Kesehatan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana/Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris: <ol style="list-style-type: none"> a. Kasubbag Umum 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan b. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Kesehatan Khusus b. Kepala Seksi Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Jiwa b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 6. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan b. Kepala Seksi, Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis 8. Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus 9. Kelompok Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b. Pengelola Sistem dan Jaringan c. Bendahara d. Pengadministrasi Keuangan e. Pengelola Gaji f. Pengelola Akuntansi g. Verifikator Data Laporan Keuangan 2. Subbagian Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum b. Pengadministrasi Persuratan c. Pranata Kearsipan d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Teknisi Sarana dan Prasarana f. Pengelola Barang Milik Negara g. Pengemudi 3. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum b. Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit c. Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman d. Analisis Kesehatan 4. Seksi Pengendalian Penyakit: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung b. Pengelola Penyakit Tidak Menular c. Analisis Kesehatan 5. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Kesehatan Khusus: <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum b. Pengelola Rujukan Kesehatan c. Analisis Kesehatan d. Di bawah Di bawah 6. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Kesehatan Jiwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Program Gizi b. Pengelola Program Kesehatan Keluarga c. Analisis Kesehatan 7. Seksi Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum b. Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di bidang Kesehatan Masyarakat c. Penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit d. Analisis Kesehatan 8. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Administrasi Umum b. Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan c. Analisis Kesehatan 9. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Obat dan Makanan b. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan

Gambar I. 4 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi BLKK

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI (BLKK)	
<p>Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:</p>	
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
1. Kepala Balai 2. Subbagian Tata usaha 3. Seksi Pelayanan 4. Kelompok Jabatan Fungsional	1. Subbagian Tata usaha a. Penyusun program kerja b. Pengelola Kearsipan c. Pengelola Keuangan d. Pengelola pendapatan e. Pengelola kepegawaian f. Pelaksana kerumahtanggaan g. Pengelola Barang h. Pelaksana Kehumasan i. Pengelola Kepustakaan j. Pengelola Data dan Informasi k. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2. Seksi Pelayanan a. Pramu Laboratorium b. Teknisi Laboratorium

Gambar I. 5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bapeljamkessos

BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	
<p>Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:</p>	
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
1. Kepala Balai 2. Subbagian Tata usaha 3. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan 4. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan 5. Kelompok Jabatan Fungsional	1. Subbagian Tata usaha a. Penyusun program anggaran dan pelaporan b. Pengelola Kearsipan c. Pengelola Keuangan d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Pengelola kerumahtanggaan f. Pengelola Barang g. Pelaksana kehumasan h. Pengelola Kepustakaan i. Pengelola Data dan informasi 2. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan a. Pelaksana verifikasi kepesertaan b. Pelaksana pengembangan paket manfaat jaminan c. Pelaksana pelayanan informasi d. Pelaksanan penanganan keluhan 3. Seksi Kepesertaan dan Pengembangan Jaminan: a. Pelaksana Verifikasi pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan b. Pelaksana Verifikasi Medik Pelayanan Kesehatan 4. Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan: a. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi b. Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Gambar I. 6 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bapelkes

BALAI PELATIHAN KESEHATAN (BAPELKES)	
Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:	
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
1. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan 2. Subbagian Tata usaha 3. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan 4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan 5. Kelompok Jabatan Fungsional	1. Subbagian Tata usaha a. Penyusun program anggaran dan pelaporan b. Pengelola Kearsipan c. Pengelola Keuangan d. Pengadministrasi Kepegawaian e. Pengelola kerumahtanggaan f. Pengelola Barang g. Pelaksana kehumasan h. Pengelola Kepustakaan i. Pengelola Data dan informasi 2. Subbagian Tata usaha: a. Analis Diklat b. Analis Kerja sama Diklat 3. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pelatihan: a. Pranata Diklat b. Pranata Jamuan c. Pengelola Asrama 4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Gambar I. 7 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi RS Paru Respira

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	
<p>Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:</p>	
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RS Paru Respira 2. Subbagian Program dan Keuangan 3. Subbag Umum 4. Seksi Pelayanan Medis 5. Seksi Pelayanan Keperawatan 6. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Program dan Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b. Analisis Sistem Informasi c. Bendahara d. Pengadministrasi Keuangan e. Pengelola Gaji f. Pengelola Akuntansi g. Verifikator Data Laporan Keuangan h. Pengelola Pendapatan 2. Subbagian Umum Jabatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengadministrasi Umum b. Perancang Diklat c. Penyusun Bahan Bantuan Hukum d. Pengelola Pengaduan Publik e. Pengadministrasi Persuratan f. Pranata Kearsipan g. Analisis SDM Aparatur h. Teknisi Sarana dan Prasarana i. Kustodian Barang Milik Negara j. Pengemudi Ambulan 3. Seksi Pelayanan Medis: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Pelayanan Kesehatan b. Pengelola Rujukan Kesehatan c. Analisis Penjamin Mutu 4. Seksi Pelayanan Keperawatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Kesehatan 5. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis: <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis Pengembangan Sistem Operasi Medis b. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan c. Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan d. Pengolah Makanan e. Binatu Rumah Sakit f. Juru Rawat Jenazah

Gambar I. 8 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi RS Jiwa Grhasia

<p style="text-align: center;">RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA</p> <p>Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kesehatan dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan dengan komposisi sebagai berikut:</p>	
Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana/Fungsional
1. Kepala RS Jiwa Grhasia 2. Sekretaris 1) Subbagian Program 2) Subbagian Keuangan 3) Subbagian Umum 3. Bidang Pelayanan Medik 1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Medik 2) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik 4. Bidang Kepelayanan Keperawatan 1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Keperawatan 2) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan 5. Bidang Penunjang dan Sarana 1) Seksi Penunjang dan Sarana Medik 2) Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik	1. Subbagian Program: a. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b. Pengelola Sistem dan Jaringan 2. Subbagian Keuangan: a. Bendahara b. Pengadministrasi Keuangan c. Pengelola Gaji d. Pengelola Akuntansi e. Verifikator Data Laporan Keuangan f. Pengelola Pendapatan 3. Subbagian Umum : a. Pengadministrasi Umum b. Pranata Diklat c. Pengelola Bantuan Hukum d. Pengelola Pengaduan Publik e. Pengadministrasi Persuratan f. Pranata Kearsipan g. Pengadministrasi Kepegawaian h. Teknisi Sarana dan Prasarana i. Pengelola Barang Milik Negara j. Pengemudi Ambulan k. Pengemudi l. Pengaduan publik m. Pengadministrasi persuratan 4. Seksi Pelayanan Medik: a. Pengadministrasi Umum b. Pengelola Pelayanan Kesehatan c. Instruktur Vokasional 5. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Keperawatan: a. Analis Penjamin Mutu 6. Seksi Pelayanan Keperawatan: a. Pengelola Keperawatan b. Pengadministrasi Umum 7. Seksi Pelayanan Penunjang Medik a. Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik b. Pengadministrasi Umum c. Pengelola Obat dan Alat-Alat Kesehatan 8. Seksi Penunjang dan Sarana Non Medik a. Pranata Diklat b. Pengolah Makanan c. Binatu Rumah Sakit d. Juru Rawat Jenazah

Dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi pelayanan Kesehatan dan mewujudkan penyederhanaan birokrasi, meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan Rumah Sakit Paru Respira menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) pada Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan. Sebagai UOBK RS Jiwa Grhasia dan RS Respira memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan pengelolaan kepegawaian. UOBK bertanggung jawab kepada Gubernur.

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dinas Kesehatan adalah institusi sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan. Isu strategis banyak berkaitan dengan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. *Stunting* dan Gizi Buruk

Angka *stunting* masih cukup tinggi. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dan RPJMD DIY 2022-2027 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Upaya untuk menekan angka *stunting* dan gizi buruk pada balita di DIY dengan mengoptimalkan pelayanan di posyandu, pemberian makanan pada ibu hamil, ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet tambah darah, inisiasi Menyusui Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI bagi anak usia 6-24 bulan, dan pemberian imunisasi dasar lengkap pada anak.

Prevalensi balita gizi kurang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 jumlah balita gizi kurang sebanyak 8.290 balita dan tahun 2023 meningkat menjadi 8.607 balita (Dataku Bappeda DIY).

2. Kematian Ibu, dan kematian bayi

Kasus kematian Ibu masih terjadi dan terus diupayakan untuk ditekan, pada tahun 2023 terdapat 22 kasus kematian Ibu. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2022 sebanyak 43 kasus. Penyebab tertinggi kematian ibu pada tahun 2023 adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serangan jantung dan penyakit tidak menular lainnya. Kasus kematian bayi pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 303 kasus pada tahun 2022 turun cukup signifikan menjadi 272 kasus.

3. Penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM) degeneratif

Kasus HIV/AIDS di DIY terus mengalami penambahan. Data kumulatif dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2023, kasus HIV sebanyak 7.741 kasus dan AIDS sebanyak 2255 kasus. Penemuan Kasus baru HIV pada tahun 2023 yaitu sebanyak 957 kasus (322 diantaranya kasus dari luar DIY),

mengalami peningkatan sebesar 15,3 % dibandingkan tahun 2022 dengan 830 kasus (220 kasus dari luar DIY). Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.

Program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di DIY menunjukkan tren peningkatan dalam menemukan kasus TBC, mengobati sampai sembuh dan memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada orang dengan infeksi laten TBC (ILTb). Tahun 2022 jumlah kasus yang ditemukan dan diobati sebanyak 5.512 kasus dari estimasi 10.530 kasus atau mencapai 52,3%. Tahun 2023 jumlah kasus yang ditemukan dan diobati sebanyak 5.988 kasus dari estimasi 9.301 kasus atau mencapai 64,4%. Dengan upaya yang semakin baik, diharapkan pada tahun 2030 akan tercapai Eliminasi TBC dengan indikator angka insidensi TBC hanya sebesar 65 per 100.000 penduduk.

Angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) DIY berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi tumor/kanker di DIY tertinggi di Indonesia yaitu 9,6 per 1000 penduduk. Berdasarkan Dataku Bappeda DIY, pada tahun 2023 Penderita Diabetes Melitus di DIY sebesar 58.242 orang, penderita Hipertensi mencapai 143.382 orang, dan terdapat 7.703 orang yang mengalami gangguan jiwa.

4. Bencana dan kejadian luar biasa (KLB)

Kondisi geografis, geologis, klimatologis DIY menempatkan DIY sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. DIY masih memiliki penyakit potensial KLB seperti malaria, demam dengue, leptospirosis, diare, kolera, difteri, antraks, rabies, campak, pertusis, maupun ancaman penyakit–penyakit *new emerging* dan *re-emerging*. Penyakit-penyakit tersebut apabila tidak dipantau dan dikendalikan maka akan mengancam kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan merilis bahwa sepanjang tahun 2023, selain Covid-19 terdapat tiga kasus konfirmasi penyakit emerging atau re-emerging yang dilaporkan di Indonesia yaitu *Monkeypox*, *Legionellosis*, dan Polio. Untuk merespon bencana dan terjadinya KLB diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana, SDM kesehatan, dan sistem kesehatan yang responsif.

5. Mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan

DIY memiliki fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) berupa 80 rumah sakit, 121 Puskesmas dan 133 klinik yang telah terakreditasi. Dengan standarisasi melalui akreditasi masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

6. Pelayanan kesehatan tradisional

Pemanfaatan kesehatan tradisional ini semakin luas dan meningkat di masyarakat. Tahun 2013 pemanfaatan kesehatan tradisional sebesar 30,4%. Pelayanan kesehatan tradisional sebagai amanah keistimewaan diharapkan mampu meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, menjadi alternatif/pilihan dalam upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, sekaligus sebagai upaya pelestarian nilai budaya adiluhung warisan leluhur yang didasarkan atas hasil inventarisasi, pengkajian, dan penelitian.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 Dinas Kesehatan beserta UPT di bawah Dinas Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Dinas Kesehatan DIY

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5	5				5	5				2	3
	2. Pengawas	9	9				9	9				2	7
	3. Pelaksana	94		60	33	1	58	15	23	14	6	20	38
C.	Jabatan Fungsional	15		15			14	2	12			3	11
	Jumlah	124	15	75	33	1	87	32	35	14	6	27	60

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kesehatan DIY Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kesehatan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 35 orang (40,2%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 32 orang (36,78%), D3 14 orang (16,1%), SLTA 4 orang (6,9%). Komposisi pegawai perempuan (68,96%) lebih banyak dibanding pegawai laki-laki (31,03%); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 37 orang dari pejabat pelaksana dan akan berkurang kembali sebanyak 7 orang pada tahun 2024 karena memasuki BUP. Dari data kekurangan pegawai tersebut, diprioritaskan usulan pemenuhan pada sekretariat untuk tenaga Kustodian Barang Milik Negara yang belum memenuhi jumlah dan pendidikan serta untuk tenaga pengadministrasi keuangan dari kebutuhan 11 orang, baru terpenuhi 4 orang. Dan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan di Jabatan Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan belum ada pejabat yang menempati.

Tabel I. 2 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (BLKK)

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SM A		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1					1
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1				1	1					1
	2. Pengawas	2	1	1			2	1	1			1	1
	3. Pelaksana	25					11		2	6	3	6	5
C.	Jabatan Fungsional												
	Dokter	5	v	v			3		3				3
	Perawat	2			v		2			2		1	1
	Pranata labkes	33	v	v	v		29	4	18	7		7	22
	Rekam Medis	1			1		0						
	Teknisi Elektromedis	4		3	1		1			1			1
	Pembimbing Kesehatan Kerja	1		1			0						
	Jumlah	75					50	7	24	16	3	15	35

Tabel I. 3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Pelatihan Kesehatan(Bapelkes)

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	4. Administrator	1	1				1	1				1	
	5. Pengawas	3		3			3	3					3
	6. Pelaksana	40		13	27		14	1	7	3	3	1	13
C.	Jabatan Fungsional	11	11				3	3				1	2
	Jumlah	55	12	16	27		21	8	7	3	3	3	18

Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Sosial (Bapeljamkessos)

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	3	2	1			1	1				0	1
	2. Pengawas	3	3				3	1	1			1	2
	3. Pelaksana	31		10	21		21	1	11	8	2	5	13
C.	Jabatan Fungsional	8	1	6	1								
	Jumlah	45	6	17	22		25	3	12	8	2	6	19

Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi RS Paru Respira

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp.
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi												
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1										
	2. Pengawas	5		5			5	2	3			2	3
	3. Pelaksana	79		29	35	13	31		11	10	10	15	16
C.	Jabatan Fungsional	182		v	v		127	15	47	65		44	83
	Jumlah	267		34	35	13	163	17	61	75	10	61	102

Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi RS Jiwa Grhasia

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SM A		S2	S1	D3	SM A		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	7. Administrator	4	4				3	3				2	1
	8. Pengawas	9		9			8	4	4			2	6
	9. Pelaksana	100		47	40	13	46	8	18	8	12	20	26
C.	Jabatan Fungsional	293					223	24	95	103	1	65	158
	Jumlah	407					281	40	117	111	13	90	191

Berdasarkan data pada tabel I.1 sampai dengan tabel I.6, jumlah seluruh pegawai Dinas Kesehatan dan UPT sebanyak 627 orang. Tingkat pendidikan didominasi S1 sebanyak 256 orang (40,8%), disusul jenjang D3 sebanyak 227 orang (36,2%), jenjang S2 sebanyak 91 orang (17,06%) dan hanya 37 orang (6%) berpendidikan SMA. Komposisi pegawai perempuan lebih mendominasi dengan jumlah 425 orang (67,78%) dibandingkan jumlah pegawai laki-laki sebesar 202 orang (32,21%).

Tabel I. 7 Sarana-Prasarana Dinas Kesehatan

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap	4.223	31.361.026.038
2	Tanah	2 unit	474.357.000
3	Peralatan dan Mesin	2.684 unit	16.290.033.754
4	Gedung dan Bangunan	21 unit	14.397.747.660
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6 unit	36.746.600
1	Aset Tetap Lainnya	1.510	47.475.970
2	Buku Perpustakaan	1.509 buku	47.275.970
3	Barang Bercorak Kesenian	1 buah	200.000
	Aset Lainnya	78 unit	553.285.750
	Jumlah	4.301 unit	31.914.311.788

Sumber: Data Neraca Dinas Kesehatan 31 Desember 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 2 (dua) unit kendaraan dinas jabatan, 18 (delapan belas) unit kendaraan operasional, dan 24 (dua puluh empat) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 8 Sarana-Prasarana BLKK

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
2	Alat-alat Angkutan	7 unit	811.411.500
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	624 unit	5.323.889.188,37
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	50 unit	262.578.685,58
1	Aset Tetap Lainnya		
2	Buku Perpustakaan	200 buku	27.228.550
	Jumlah	881 unit	6.334.107.923,95

Sumber: Data Neraca BLKK 31 Desember 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 3 (tiga) unit kendaraan operasional, dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca,

ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 9 Sarana-Prasarana Bapeljamkessos

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	7 unit	670.547.000
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	488 unit	833.924.750
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	14 unit	118.327.500
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan (Bahan Perpustakaan)	49 buku	5.417.655
	Jumlah	558 unit	1.628.216.905

Sumber: Data Neraca Bapeljamkessos 31 Desember 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 3 (tiga) unit roda dua, 1 (satu) unit kendaraan dinas roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan operasional roda empat. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 10 Sarana-Prasarana Bapelkes

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	11 unit	2.604.898.350
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	668 unit	2.906.395.519
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	44 unit	269.013.769
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	1.126 buku	76.659.121
	Jumlah	1.849 unit	5.856.966.759

Sumber: Data Neraca Bapelkes 31 Desember 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Ambulans) dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua. Terdapat 1 (satu) unit kendaraan roda empat dalam proses penghapusan. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 11 Sarana-Prasarana RS Paru Respira

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	12 unit	1.949.224.913
2	Alat-alat Kantor dan Rumah	1448 unit	3.304.495.973
	Tangga	103 unit	494.992.564
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi		
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	348 buku	62.911.850
	Jumlah	1.911 unit	5.811.625.300

Sumber: Data Neraca RS Paru Respira 31 Desember 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit mobil jenazah, 2 (dua) unit mobil ambulans dan 7 (unit) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Ruangan untuk pelayanan terdiri dari: ruang UGD, ruang rawat inap, ruang rawat jalan, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang *laundry*, dan ruang gizi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 12 Sarana-Prasarana RS Jiwa Grhasia

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Gedung dan Bangunan	80 unit	60.499.515.345
2	Alat-alat Angkutan	37 unit	2.575.004.080
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	94 unit	351.647.075
4	Alat Pertanian	12 unit	21.186.700
5	Alat-alat Kantor dan Rumah	1.448 unit	9.894.259.198
6	Tangga	156 unit	684.727.203
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	2.002 unit	16.091.265.085
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	297 unit	2.283.537.455
9	Komputer dan perangkat	15 unit	158.063.810
	Alat Keamanan, olahraga permainan		
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	478 buku	97.700.130
	Jumlah	4.619 unit	92.656.906.081

Sumber: Data Neraca Bapeljamkessos 31 Desember 2023

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (lima) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit mobil jenazah, 3 (tiga) unit ambulans, 1 (satu) unit bus dan 2 (unit) kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang aula, ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, masjid, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu,

ruang laktasi, dan toilet. Ruangan untuk pelayanan terdiri dari: ruang UGD, ruang rawat inap, ruang rawat jalan, ruang radiologi, ruang laboratorium, ruang *laundry*, dan ruang gizi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 13 Anggaran Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.704.200.000	11.519.200.000	2.815.000.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	8.704.200.000	11.519.200.000	2.815.000.000
			Jumlah Pendapatan	8.704.200.000	11.519.200.000	2.815.000.000
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	151.749.297.885	185.045.986.046	33.296.688.161
5	1	01	Belanja Pegawai	34.126.462.606	53.121.679.384	18.995.216.778
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	117.009.835.279	131.311.306.662	14.301.471.383
5	1	05	Belanja Hibah	613.000.000	613.000.000	Rp. 0
5	2		BELANJA MODAL	6.188.833.500	9.243.595.900	3.054.762.400
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.188.833.500	9.153.595.900	2.964.762.400
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	90.000.000	90.000.000
			Jumlah Belanja	157.938.131.385	194.289.581.946	36.351.450.561
			Total Surplus/(Defisit)	(149.233.931.385)	(182.770.381.946)	(33.536.450.561)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
			Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.12, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Kesehatan DIY semula Rp 157.938.131.385 dan mengalami perubahan menjadi Rp 194.289.581.946 atau bertambah Rp 36.351.450.561 Perubahan anggaran Tahun 2023 sebagai penghargaan Pemerintah pusat kepada Pemda DIY melalui Dana Insentif Daerah (DID) untuk penanganan *stunting* dan kebencanaan.

Tabel I. 14 Anggaran RS Jiwa Grhasia Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.360.000.000	18.354.902.000	(2.005.098.000)
4	1	02	Retribusi Daerah	20.360.000.000	18.354.902.000	(2.005.098.000)
			Jumlah Pendapatan	20.360.000.000	18.354.902.000	(2.005.098.000)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	62.465.831.583	72.018.354.249	9.552.522.666
5	1	01	Belanja Pegawai	48.416.734.033	46.059.618.038	(2.357.115.995)

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.049.097.550	25.958.736.211	11.909.638.661
5	1	05	Belanja Hibah	0	0	0
5	2		BELANJA MODAL	1.237.570.400	1.472.633.400	235.063.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.037.770.400	1.350.633.400	312.863.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.800.000	122.000.000	(77.800.000)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja				63.703.401.983	73.490.987.649	9.787.585.666
Total Surplus/(Defisit)				(43.343.401.983)	(55.136.085.649)	(11.792.683.666)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				0	0	0
Pembiayaan Neto				0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RS Jiwa Grhasia Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi RS Jiwa Grhasia berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.13, untuk tahun 2023 Anggaran RS Jiwa Grhasia semula Rp 63.703.401.983,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 73.490.987.649,00 atau bertambah Rp 9.787.585.666,00. Perubahan anggaran bersumber dari dana SILPA digunakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional.

Tabel I. 15 Anggaran RS Paru Respira Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.400.000.000	10.400.000.000	0
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	10.400.000.000	10.400.000.000	0
Jumlah Pendapatan				10.400.000.000	10.400.000.000	0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	38.175.033.894	38.175.033.894	0
5	1	01	Belanja Pegawai	25.272.393.234	25.272.393.234	0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.902.640.660	12.902.640.660	0
5	2		BELANJA MODAL	107.195.183.297	65.970.619.074	(41.224.564.223)
5	2	01	Belanja Modal Tanah	99.995.183.297	57.504.658.074	(42.490.525.223)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.507.362.500	2.873.323.500	1.365.961.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.242.637.500	5.142.637.500	(100.000.000)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	450.000.000	450.000.000	0
Jumlah Belanja				145.370.217.191	114.306.979.559	31.063.237.632
Total Surplus/(Defisit)				(134.970.217.191)	(103.906.979.559)	(31.063.237.632)
6			PEMBIAYAAN DAERAH		6	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				0	0	0
Pembiayaan Neto				0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RS Paru Respira Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi RS Paru Respira berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.5, untuk tahun 2023 Anggaran RS Paru Respira semula Rp 145.370.217.191,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 114.306.979.559,00 atau berkurang Rp 31.063.237.632,00. Perubahan anggaran dikarenakan adanya pengurangan anggaran belanja pengembangan rumah sakit berupa pengadaan tanah.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I. 16 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Meningkatkan peran serta seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY agar memahami dan lebih peduli atas hasil pengukuran kinerja, sehingga pada aspek pengukuran kinerja, khususnya yang terkait dengan peran serta segenap pegawai Dinas Kesehatan DIY untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dapat dipertahankan nilainya pada kesempatan mendatang, bahkan dapat ditingkatkan;	Internalisasi tugas fungsi organisasi hingga tanggung jawab masing-masing individu kepada seluruh komponen di Dinas Kesehatan dan meningkatkan koordinasi untuk optimalisasi kinerja Dinkes DIY
2.	Meningkatkan koordinasi internal dan koordinasi lintas sektor sehingga capaian sasaran/kinerja organisasi menjadi lebih baik	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap pegawai Dinas Kesehatan DIY untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kinerja melalui berbagai Upaya dan memperluas jejaring kerja dengan lintas sektor, organisasi non pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja *output* dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Kesehatan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kesehatan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat dan meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut, tujuan dari Dinas Kesehatan adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Adapun sasaran Dinas Kesehatan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Kesehatan DIY, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	n/a	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,42
2.	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya keluarga sehat	1. Fokus pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana dan KLB dengan penekanan <i>pre-hospital emergency</i> dan penguatan SPGDT serta dukungan pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan	1. Optimalisasi upaya perencanaan, pencapaian, dan pengendalian SPM Bidang Kesehatan tingkat provinsi serta optimalisasi dukungan pencapaian SPM kabupaten kota dengan meningkatkan kemitraan lintas sektor
2.	Meningkatnya Tata kelola penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	2. Fokus pada pencapaian transformasi Sistem Kesehatan dengan peningkatan kualitas SDM, penguatan pembiayaan jaminan kesehatan, penguatan layanan kesehatan primer, penguatan layanan rujukan, dan pengembangan RS Paru Respira menjadi RS Unggulan Paru di DIY dan Jateng wilayah selatan 3. Fokus pada intervensi penurunan <i>stunting</i> 4. Fokus pada <i>bridging system</i> /integrasi sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan 5. Fokus mendukung budaya dan kesesuaian tata ruang dengan upaya pengembangan kesehatan tradisional serta mengembangkan RS Jiwa Grhasia menjadi RS penyangga layanan kesehatan di kawasan rawan bencana Merapi 6. Fokus pada pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat	2. Optimalisasi mutu layanan dan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan untuk mengurangi disparitas layanan di wilayah Selatan 3. Optimalisasi konvergensi program untuk pencapaian penurunan <i>stunting</i> dengan pencapaian Indeks Keluarga Sehat dan Penguatan GERMAS 4. Optimalisasi implementasi dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi dan <i>real time</i> 5. Optimalisasi pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas serta optimalisasi pengembangan dan pembangunan RS Grhasia menjadi RS penyangga layanan kesehatan di kawasan rawan bencana Merapi 6. Optimalisasi pengarusutamaan gender pada pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan

2.1. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 maupun program kegiatan sub kegiatan UPT dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran 1 dan 2 Tahun 2023 Dinas Kesehatan

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya keluarga sehat	1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	28.895.584.331	17.650.607.550	(11.244.976.781)
	1.02.02.1.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.099.924.400	1.099.256.400	(668.000)
	1.02.02.1.01.21. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	248.792.400	248.124.400	(668.000)
	1.02.02.1.01.22. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	851.132.000	851.132.000	0
	1.02.02.1.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	27.750.477.931	16.506.169.150	(11.244.308.781)
	1.02.02.1.02.01. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	16.415.611.031	4.374.610.150	(12.041.000.881)
	1.02.02.1.02.02. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	692.108.100	1.325.680.600	633.572.500

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.02.02.1.02.02.03. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	419.806.600	419.006.600	(800.000)
	1.02.02.1.02.02.04. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	422.500.000	45.834.000	(376.666.000)
	1.02.02.1.02.02.05. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	19.901.000	19.901.000	0
	1.02.02.1.02.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.028.463.200	351.056.200	(677.407.000)
	1.02.02.1.02.02.07. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	45.001.000	42.001.000	(3.000.000)
	1.02.02.1.02.02.08. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	207.445.500	1.539.595.500	1.332.150.000
	1.02.02.1.02.02.09. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.935.209.700	3.503.822.600	(431.387.100)
	1.02.02.1.02.02.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.721.753.600	4.105.123.300	383.369.700
	1.02.02.1.02.02.16. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18.085.000	18.085.000	0
	1.02.02.1.02.02.17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	226.228.400	226.228.400	0
	1.02.02.1.02.02.19. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	288.156.500	270.156.500	(18.000.000)
	1.02.02.1.02.02.23. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	310.208.300	260.208.300	(50.000.000)
	1.02.02. 1.04. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	45.182.000	45.182.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.02.02. 1.04.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.582.000	14.582.000	0
	1.02.02. 1.04.03. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	30.600.000	30.600.000	0
	1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	391.718.800	1.469.336.600	1.077.617.800
	1.02.03.1.02. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	391.718.800	1.469.336.600	1.077.617.800
	1.02.03.1.02. 01. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.558.000	1.076.031.000	1.051.473.000
	1.02.03.1.02. 02. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	367.160.800	393.305.600	26.144.800
	1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	13.090.600	13.090.600	0
	1.02.04.1.01. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	13.090.600	13.090.600	0
	1.02.04.1.01.01. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	13.090.600	13.090.600	0
	2.22. 05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	476.677.300	476.677.300

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	2.22. 05.1.01. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	476.677.300	476.677.300
	2.22. 05.1.01.01. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	476.677.300	476.677.300
	2.22.08 Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	389.855.000	455.069.000	65.214.000
	2.22.08.5.08.04 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	389.855.000	455.069.000	(65.214.000)
	1.02.01.1.10.01. Peningkatan Pelayanan BLUD (RS Paru Respira)	17.600.000.000	29.669.276.055	12.069.276.055
	1.02.01.1.10.01. Peningkatan Pelayanan BLUD (RS Jiwa Grhasia)	21.488.919.700	32.982.580.890	(11.493.661.190)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	29.690.248.171	19.588.103.750	(10.102.144.421)
2. Meningkatkan Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.579.062.978	50.956.334.756	17.377.271.778
	1.02.01.1.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.884.980.078	48.278.268.456	17.393.288.378
	1.02.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.884.980.078	48.278.268.456	17.393.288.378
	1.02.01.1.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0	12.960.000	12.960.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1..1.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	7.625.000	5.625.000
	1.02.01.1.03..02. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	2.000.000	0
	1.02.01.1.03..06. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	5.625.000	5.625.000
	1.02.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.005.300	7.625.000	(232.380.300)
	1.02.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.042.300	4.042.300	0
	1.02.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.907.200	33.907.200	0
	1.02.01.1.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.532.500	13.532.500	0
	1.02.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.576.300	13.576.300	0
	1.02.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.720.000	19.720.000	0
	1.02.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	0
	1.02.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.207.000	139.207.000	0
	1.02.01.1.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.802.300	89.802.300	0
	1.02.01.1.07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.802.300	89.802.300	0
	1.02.01.1.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.763.734.900	1.763.734.900	0
	1.02.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	1.02.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	771.762.100	771.762.100	0
	1.02.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.472.800	990.472.800	0
	1.02.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	578.038.800	578.038.800	0
	1.02.01.1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.888.900	286.888.900	0
	1.02.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.149.900	111.149.900	0
	1.02.01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180.000.000	180.000.000	0
	1.02.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RS Paru Respira)	21.651.386.634	20.762.368.517	(889.018.117)
	1.02.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RS Jiwa Grhasia)	42.214.482.283	40.508.406.759	(1.706.075.524)
	Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2	97.444.931.850	112.227.110.032	14.782.178.182
	Total Anggaran	127.135.180.021	131.815.213.782	4.680.033.761

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,33	Triwulan I	0,30
					Triwulan II	0,31
					Triwulan III	0,32
					Triwulan IV	0,33
2.	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 214.742.253.288
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 735.503.000
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 13.090.600
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 389.855.000
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 151.131.048.680
	Jumlah Anggaran	Rp 367.011.750.568

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen Rp. 10.462.224.000.

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,33	Triwulan I	0,30
					Triwulan II	0,31
					Triwulan III	0,32
					Triwulan IV	0,33
2.	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

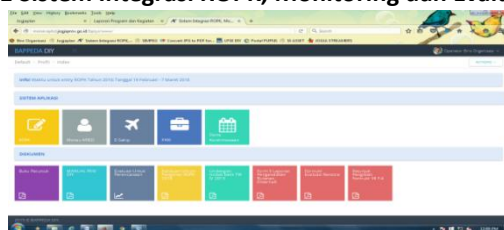
No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 113.336.698.017
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.805.700.800
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 13.090.600
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 476.677.300
5.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 455.069.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 78.202.346.229
	Jumlah Anggaran	Rp 194.289.581.946

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen Rp 8.444.993.000.

2.4. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

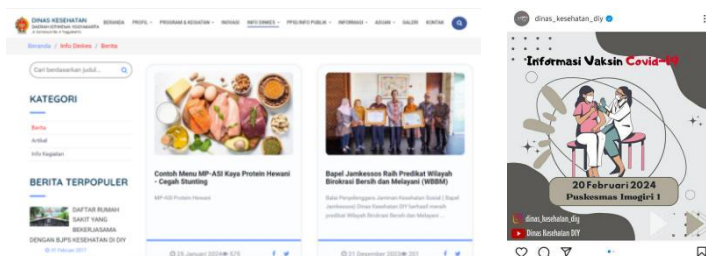
Gambar II. 1 Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP



Sumber: <http://sungguh.jogjaprov.go.id/>

2. Website dan Instagram Dinas Kesehatan DIY adalah instrumen yang mendukung upaya keterbukaan publik melalui berbagai informasi dan laporan yang disajikan kepada masyarakat.

Gambar II. 2 Website dan Instagram



Sumber: <http://dinkes.jogjaprov.go.id/> dan https://www.instagram.com/dinas_kesehatan_diy/

3. SIMKIA (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) ISTIMEWA adalah aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan Dinas Kesehatan DIY untuk memudahkan pengelolaan data. Aplikasi ini menggantikan metode kohort manual versi lama, tidak membutuhkan kertas cetak kohort, sehingga mengurangi biaya. Data pemeriksaan kesehatan ibu hamil hingga balita dientri oleh fasilitas pemberi layanan, dan selanjutnya, data tersebut dapat diakses oleh wilayah pengampu sasaran. Melalui aplikasi ini data seluruh ibu hamil, nifas, bayi, dan balita di DIY dapat terekam dengan baik *by name by address* sehingga dapat memberikan

manfaat bagi upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di DIY.

Gambar II. 3 SIMKIA



www.simundu.jogjaprov.go.id/kartini

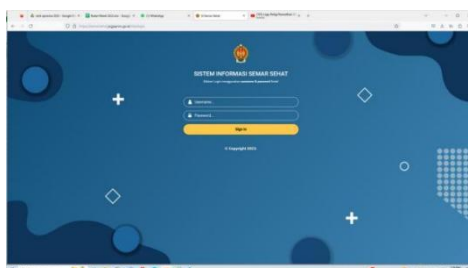
4. Aplikasi MobScreen PenjarKes adalah aplikasi penjangkauan kesehatan untuk peserta didik di DIY mulai dari tingkat SD hingga SMA termasuk SLB dan pendidikan non formal. Melalui aplikasi MobScreen PenjarKes, pendataan kesehatan peserta didik dapat dilakukan lebih mudah sekaligus mempermudah petugas puskesmas dalam melakukan penilaian rekapitulasi dan pencatatan laporan. Aplikasi MobScreen PenjarKes ini merupakan kerja sama Dinas Kesehatan DIY bersama Dinas Kominfo DIY dan Bank BPD DIY.

Gambar II. 4 Mobscreen



5. SI SEMAR SEHAT (Sistem Informasi Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan) adalah aplikasi berbasis *website* untuk memudahkan pekerjaan dalam pendistribusian obat, alat kesehatan dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan DIY.

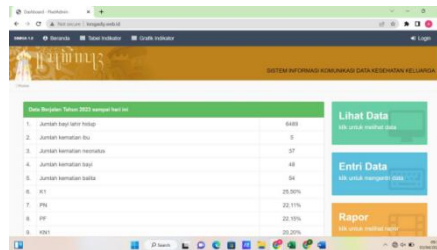
Gambar II. 5 SEMAR SEHAT



Sumber: <https://semarsehat.jogjaprov.go.id/site/login>

6. Dinas Kesehatan DIY memiliki aplikasi <https://kesgadiy.web.id/> yang digunakan dalam pelaporan capaian pelayanan kesehatan keluarga. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses oleh publik. Data hasil capaian yang tercantum pada aplikasi, data diinput oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan.

Gambar II. 6 Website Kesga



The screenshot shows a web application interface for health service reporting. It features a header with navigation links and a main content area with a table of data and several action buttons on the right.

Data Realisasi Tahun 2022 (Angka Asli)	
1. Jumlah bayi lahir hidup	8488
2. Jumlah kelahiran ibu	8
3. Jumlah kelahiran normal	37
4. Jumlah kelahiran bayi	48
5. Jumlah kelahiran sakti	84
6. RT	25.50%
7. PKB	22.11%
8. PKP	22.11%
9. RPKP	20.10%

On the right side of the dashboard, there are four buttons: 'Lihat Data' (green), 'Entri Data' (blue), 'Rapor' (orange), and 'Logout' (small grey button at the top right).

Sumber: www.kesgadiy.web.id

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Kesehatan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kesehatan DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	REALISASI 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya keluarga sehat	<u>Indikator:</u> Indeks Keluarga Sehat <u>Meta Indikator:</u> Terdapat 12 indikator utama sebagai perhitungan IKS sesuai dengan permenkes nomor 39 tahun 2016	Indeks	NA	0,31	0,33	0,35 (jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 sebanyak 281.367 keluarga dibagi Jumlah Keluarga di DIY sebanyak 814,367 keluarga)	106,06 (realisasi sebesar 0,35 dibagi target sebesar 0,33 dikali 100%)	Sangat Baik	0,42
2	Meningkatnya	<u>Indikator:</u>	kategori	A	A	A atau 2	A atau 2	100	Sangat	A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	REALISASI 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Kategori RB					(Penilaian atas RB Tematik dan RB General oleh Biro Organisasi)	Persentase realisasi terhadap target (target dibagi capaian dikalikan 100%)	Baik	

Keterangan:

Kategori nilai 1=AA, 2 = A, BB=3, 4 = B

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya keluarga sehat

Kinerja sasaran Terwujudnya keluarga sehat diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	<p>Capaian indikator sasaran dihitung dari jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 dibagi dengan jumlah keluarga di DIY</p> $\text{rumus IKS} = \frac{\sum \text{Keluarga dengan IKS} > 0,8}{\sum \text{Keluarga}}$ <p>Nilai IKS merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengikuti program KB 2. Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 5. Pertumbuhan Balita dipantau 6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi yang berobat teratur 8. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN 11. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 12. Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga

Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 4 Rekapitulasi Indeks Keluarga Sehat Provinsi Tahun 2023

No	Indikator	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	%Cakupan Provinsi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keluarga Mengikuti program KB*)	48,78%	60,79%	52,48%	43,66%	51,63%	52,42%
	Σ Keluarga Bernilai Y	14.799	48.241	9.272	26.804	11.119	110.235
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	30.337	79.363	17.668	61.386	21.538	210.292
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	97,96%	98,33%	85,01%	98,21%	96,60%	97,59%
	Σ Keluarga Bernilai Y	3.407	7.665	709	8.384	1.764	21.929
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	3.478	7.795	834	8537	1.826	22470
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	98,66%	98,39%	95,21%	98,50%	98,05%	98,32%
	Σ Keluarga Bernilai Y	3.906	9.323	1.013	10.270	2.063	26.575
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	3.959	9.476	1.064	10.426	2.104	27.029
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	91,33%	93,06%	86,10%	90,13%	90,24%	91,20%
	Σ Keluarga Bernilai Y	4.974	12.208	1.165	13.023	2.653	34.023
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	5.446	13.118	1.353	14.449	2.940	37.306
5	Pertumbuhan Balita dipantau	96,71%	95,58%	93,04%	94,37%	94,48%	95,11%
	Σ Keluarga Bernilai Y	19.040	42.696	4.748	45.524	9.851	121.859
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	19.687	44.670	5.103	48.242	10.426	128.128
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	39,95%	37,02%	25,67%	39,23%	49,58%	38,65%
	Σ Keluarga Bernilai Y	807	1.645	372	1.833	939	5.596
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	2.020	4.443	1.449	4.672	1.894	14.478
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	18,80%	28,23%	11,88%	35,11%	33,38%	28,71%
	Σ Keluarga Bernilai Y	9.434	24.002	1.609	34.288	10.076	79.409
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	50.194	85.022	13.544	97.645	30.183	276.588
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	50,70%	34,65%	34,03%	23,93%	48,05%	33,96%
	Σ Keluarga Bernilai Y	723	1.091	147	872	358	3.191
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	1.426	3.149	432	3.644	745	9.396
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	54,38%	58,16%	48,57%	59,41%	64,59%	58,16%
	Σ Keluarga Bernilai Y	71.528	159.984	18.137	174.797	49.499	473.945
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	131.542	275.088	37.341	294.233	76.638	814.842
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	79,67%	78,69%	58,60%	78,07%	92,46%	79,00%
	Σ Keluarga Bernilai Y	104.810	216.459	21.882	229.551	70.862	643.564
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	131.548	275.094	37.341	294.028	76.639	814.650
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	92,83%	94,88%	94,34%	95,24%	97,02%	94,86%
	Σ Keluarga Bernilai Y	122.121	26.1063	35.214	280.265	74.335	772.998
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	131.549	275.150	37.325	294.272	76.619	814.915
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	96,35%	97,83%	93,08%	96,91%	98,35%	97,09%
	Σ Keluarga Bernilai Y	126.739	269.186	34.739	285.155	75.335	791.154
	Σ Keluarga keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"	131.544	275.145	37.322	294.243	76.600	814.854
Indeks Keluarga Sehat (IKS)		0,29	0,36	0,18	0,36	0,44	0,35
Σ Keluarga dengan IKS > 0,800		37.740	97.871	6.831	104.971	33.954	281.367
Σ Keluarga		131.553	275.158	37.341	294.294	76.639	814.985

Keterangan:

Σ Keluarga Bernilai Y : Adalah suatu kondisi/keadaan anggota keluarga atau keluarga **SESUAI** dengan indikator

Σ Keluarga bernilai "N" : Adalah suatu kondisi/keadaan dimana indikator tersebut **TIDAK BERLAKU** untuk anggota keluarga atau keluarga yang bersangkutan (tidak dijumpai)

Σ Keluarga : Adalah jumlah keluarga yang ada di masing-masing wilayah (bukan jumlah dari per masing-masing indikator)

Sumber: Diakses pada 31 Desember 2023 dari <http://www.keluargasehat.kemkes.go.id>

Kinerja Sasaran 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat” pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya keluarga sehat <u>Meta Indikator :</u> Jumlah keluarga yang memiliki 0,8 dari 12 indikator IKS	0,31	0,33	0,35 (jumlah keluarga di DIY yang memiliki IKS lebih dari 0,8 sebanyak 281.367 keluarga dibagi Jumlah Keluarga di DIY sebanyak 814,367 keluarga)	106,06% (0,35 / 0,33 x 100%)	0,42	83,33% (0,33/0,42 x 100%)

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: terwujudnya keluarga sehat adalah sebagai berikut:

- Tercapai 106,06%, dengan demikian realisasi terhadap target sebesar 0,33 (terlampau).
- Dibandingkan tahun 2022 capaian target IKS tahun 2023 mengalami kenaikan indeks sebesar 0,02 dari 0,31 menjadi 0,33. Sasaran strategis 1 “Terwujudnya Keluarga Sehat” dengan IKS sebagai indikator kinerja baru ditetapkan pada tahun 2023 sesuai Renstra Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 - 2027.
- Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sebesar 83,33%.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 6 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1. Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya: 6 dokumen dari 6 dokumen 2. Dokumen hasil pembinaan sarana produksi dan distribusi makanan di sekolah 3. Dokumen distribusi obat, vaksin dan alat kesehatan dari Instalasi Farmasi Dinkes DIY ke Kabupaten/Kota 4. Dokumen pembinaan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar 5. Dokumen pembinaan instalasi farmasi dalam pelaksanaan manajemen mutu 6. Dokumen hasil kalibrasi sarana prasarana instalasi farmasi dinas kesehatan DIY	100%	100%	100%
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan: 5 paket dari 5 paket	100%	100%	100%
	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (orang)	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	100%	100%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	100%	100%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	100%	100%
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	100%	100%	100%
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public <i>Safety Center</i> (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (unit)	100%	100%	100%
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti Perizinannya	100%	100%	100%
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (unit)	100%	100%	100%
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (orang)	100%	100%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	100%
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	100%	100%	100%
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	100%	100%	100%
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional (unit)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	100%	100%	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketercapaian program sebesar 100% didukung oleh 18 kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sekretariat serta semua UPT dan UOBK pada Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Capaian dihitung dari jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh kegiatan dalam program UKP dan UKM yang tertuang dalam DPA Dinkes DIY dikalikan 100%.

- b. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Tercapai 100% didukung oleh 2 kegiatan yaitu: Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Beberapa Upaya yang dan dukungan untuk memenuhi target adalah:

- 1) Melakukan pemutakhiran data Sumber Daya Kesehatan melalui aplikasi SISDMK, menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan tahunan, dan melaksanakan uji kompetensi, bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota, RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan organisasi profesi bidang Kesehatan.
- 2) Dukungan Organisasi Profesi, BPJS Kesehatan untuk mendukung Fasilitas kesehatan memenuhi standar perizinan fasilitas kesehatan, standar Kemenkes dan PMK nomor 43 tahun 2019.
- 3) Dukungan BKD/BKPP/BKPSDM dan Biro Organisasi/Bagian Organisasi untuk pemenuhan SDMK di Puskesmas, RSUD Kab/Kota dan RS Khusus di Provinsi.
- 4) Dukungan Regulasi, Sistem aplikasi SISDMK, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung pembinaan dan pengawasan SDMK di Fasyankes
- 5) Dukungan teknologi digital untuk kemudahan dalam kegiatan.

- c. Capaian Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Tercapai 100% didukung oleh terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan

Cabang PAK. Pada tahun 2023 sejumlah 34 sarana produksi dan distribusi kefarmasian dilakukan pembinaan, dalam rangka tindak lanjut perizinan dengan rincian:

- 1) Audit Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) dengan target 4 sarana tercapai 4 sarana (100%).
 - 2) Pembinaan sarana produksi dan distribusi kefarmasian target 30 sarana tercapai 30 sarana (100%).
- d. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tercapai 100% didukung oleh kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Beberapa Upaya yang dilakukan antara lain:
- 1) Kerja sama lintas sektor terutama dari tim RAD *stunting*, RAD Germas dan jejaring *pentahelix*.
 - 2) Komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah.
 - 3) Koordinasi dan kolaborasi dalam menyiapkan integrasi layanan primer yang mendukung layanan kesehatan masyarakat baik dari sisi layanan kesehatan primer, laboratorium kesehatan masyarakat dan posyandu.
- e. Capaian Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Tercapai 100% dengan dukungan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah Kajian pengembangan kesehatan tradisional, Implementasi pelayanan kesehatan tradisional di DIY, kompetisi kesehatan tradisional berupa lomba video jamu dan pelayanan kesehatan tradisional, dan digitalisasi kesehatan tradisional.

Faktor Pendukung keberhasilan

Faktor pendukung capaian 12 indikator IKS adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga mengikuti program KB
Dukungan untuk capaian program KB antara lain: menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam peningkatan capaian program KB, bersama BKKBN DIY dan DP3AP2 DIY mendorong terbitnya SE Gubernur tentang KB Pasca salin, dan mengadakan pelatihan bagi petugas dalam pelayanan kontrasepsi.
- b. Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) melalui program kelas ibu hamil di puskesmas, pelaksanaan ANC

terpadu bumil di puskesmas, koordinasi penyediaan USG di puskesmas (pengadaan oleh pusat, provinsi berkoordinasi untuk memastikan puskesmas memiliki), dan peningkatan kapasitas Nakes melalui pelatihan kegawatdaruratan maternal neonatal.

c. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap

Capaian imunisasi dasar lengkap didukung dengan KIE yang rutin dilakukan selama kehamilan melalui kelas bumil, kunjungan neonatal maupun posyandu.

d. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif

Upaya yang telah dilakukan antara lain: penguatan kapasitas Nakes melalui pelatihan konseling menyusui, pemberian makan bagi bayi dan anak (PMBA), *refreshing/update* informasi bagi konselor menyusui, dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif dan KIE menggunakan buku KIA.

e. Pertumbuhan Balita dipantau

Dukungan untuk capaian Pertumbuhan Balita dipantau diantaranya adalah: monitoring pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu secara rutin melalui system surveilans sigizi terpadu, koordinasi penyediaan alat antropometri untuk pemantauan pertumbuhan di posyandu (pengadaan oleh pusat, tetapi provinsi berkoordinasi untuk memastikan seluruh posyandu memiliki alat antropometri terstandar), dan pelatihan kapasitas Nakes melalui pelatihan SDIDTK - PMBA (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang – Pemberian Makan Bayi dan Anak).

f. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar

Upaya yang telah dilakukan antara lain memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan baik klinik, puskesmas, maupun rumah sakit dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif khususnya tentang TBC. Upaya lainnya adalah melibatkan mitra non pemerintah baik bidang kesehatan maupun non kesehatan seperti LSM, Organisasi Penyintas TBC, Perusahaan Swasta serta melibatkan mitra perguruan tinggi. Semua komponen tersebut juga sudah terkoordinasi dalam Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis DIY melalui SK Gubernur DIY Nomor 55/TIM/2022 tanggal 21 Maret 2022.

g. Penderita hipertensi yang berobat teratur

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian penderita hipertensi yang berobat teratur antara lain: optimalisasi lintas sektor untuk penemuan/deteksi dini hipertensi dalam posbindu, bimbingan teknis puskesmas dalam pencatatan kohort pasien hipertensi untuk pemantauan, promosi kesehatan

terkait dengan hipertensi pada semua lapisan masyarakat, dan koordinasi fasyankes milik pemerintah maupun swasta.

- h. Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan

Kegiatan yang dilakukan untuk diantaranya adalah: pelatihan tata laksana kesehatan jiwa untuk nakes, pelatihan promotif dan preventif kesehatan jiwa untuk nakes, optimalisasi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) pada tingkat provinsi sampai ke tingkat kalurahan, gerakan deteksi dini pada semua siklus kehidupan seperti di sekolah, pembentukan kelompok swabantu, penguatan tim kesehatan jiwa terpadu di puskesmas melalui pelatihan bagi Nakes, dan advokasi untuk pembuatan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapegub) kesehatan jiwa.

- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Upaya yang dilakukan antara lain: Skrining rokok pada usia sekolah untuk mencegah *new smoker* (perokok baru), optimalisasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok), advokasi perda untuk kabupaten/kota terkait dengan KTR, optimalisasi UBM (upaya berhenti merokok), pelatihan UBM untuk tenaga kesehatan, promosi kesehatan dengan lintas sektor, dan perencanaan pembuatan satgas KTR di Pemda DIY.

- j. Keluarga sudah menjadi anggota JKN

Dukungan untuk capaian keluarga sudah menjadi anggota JKN diantaranya adalah redistribusi kepesertaan, pembinaan dan *monitoring* evaluasi rujukan non spesialisik, penguatan jejaring, pembentukan tim pertimbangan klinis, dan fasilitasi kredensialing bagi fasyankes.

- k. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih

Kegiatan pendukung capaian adalah fasilitasi Surveilans Kualitas Air Minum di DIY, pengadaan Sanitarian kit dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Sosialisasi dan pemeriksaan air minum masyarakat.

- l. Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Jamban Tahun 2023 untuk Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunungkidul, pertemuan Hasil Verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kader, orientasi verifikasi Desa STBM bagi kader, penguatan Kapasitas Penyehatan Lingkungan Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment).

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Aplikasi PISPK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) merupakan salah satu sistem informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, dan daerah tidak dapat memutakhirkan data pada setiap waktu (*real time*). Aplikasi ini tidak bisa di buka setiap saat oleh daerah untuk melihat progres pencapaian Indeks Keluarga Sehat, dan ketercapaian masing-masing indikatornya. Disamping itu masih ada beberapa aplikasi di daerah yang lebih dahulu diimplementasikan belum bisa diintegrasikan dengan aplikasi baru dari pusat. Hal ini terjadi pada aplikasi SIMUNDU yang belum bisa diintegrasikan dengan ASIK, di satu sisi kebijakan pusat hanya menggunakan aplikasi pusat untuk melihat progres pencapaian layanan Kesehatan dan tidak mempertimbangkan sistem pelaporan yang sudah terbangun di daerah.
- b. Masih adanya perbedaan persepsi dalam memahami regulasi baru, diantaranya disebabkan sosialisasi secara daring yang kurang efektif mengakomodir komunikasi dua arah.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan belum berjalan secara efektif.
- d. Kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dari sisi jumlah dan kualifikasinya.
- e. Keterlambatan pedoman dan petunjuk teknis dari pusat, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan Keputusan di tingkat daerah.
- f. Masih minimnya sarana prasarana untuk pelayanan Kesehatan yang bersertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) seperti Obat, reagen dan alat Kesehatan maupun alat laboratorium sehingga dukungan untuk pencapaian penggunaan produk dalam negeri kurang optimal dalam Reformasi Birokrasi.

3.1.2. Sasaran 2 Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari Hasil Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 37 (tiga puluh tujuh) OPD. Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *leading sector* Reformasi Birokrasi General dan Perangkat Daerah Koordinator Reformasi Birokrasi Tematik. Indikator tersebut merupakan indikator yang diturunkan dari Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III. 8 Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Capaian Sasaran Strategis	50	Diukur dengan indikator turunan Keputusan Menteri PAN dan RB RI Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	26	
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	24	
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif	28	

No	Uraian	Bobot	Keterangan
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	12	
Total RB General		100	
Reformasi Birokrasi Tematik			Diukur dengan memetakan kontribusi peran
A	Sasaran Pelaksanaan RB Tematik	5	
B	Capaian Dampak RB Tematik	15	Perangkat Daerah dalam pencapaian target RB Tematik
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023

No	Unit Kerja	RB General	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kategori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	83,77	5,81	89,58	A	Memuaskan	84,76	83,97
2	Biro Hukum Setda DIY	83,93	5,30	89,23	A	Memuaskan	83,55	81,75
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,97	5,41	92,38	A	Memuaskan	83,91	83,9
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,04	4,63	87,67	A	Memuaskan	83,43	82,01
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,46	8,00	91,46	A	Memuaskan	81,68	71,8
6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	85,25	6,49	91,74	A	Memuaskan	83,38	77,87
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,67	4,50	88,17	A	Memuaskan	82,39	81,59
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,39	5,25	88,64	A	Memuaskan	82,51	80,29
9	Paniradya Kaistimewan	86,75	6,43	93,18	A	Memuaskan	82,84	79,26
10	Sekretariat DPRD DIY	77,60	4,33	81,93	A	Memuaskan	82,75	77,75

No	Unit Kerja	RB Gener al	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kate gori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
11	Inspektorat DIY	86,83	6,30	93,13	A	Memuaskan	86,43	85,32
12	Dinas Pariwisata DIY	82,67	5,73	88,40	A	Memuaskan	78,73	77,15
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	85,72	6,87	92,59	A	Memuaskan	83,77	82,86
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	83,43	8,07	91,50	A	Memuaskan	82,90	81,34
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	82,60	6,97	89,57	A	Memuaskan	83,90	82,09
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	83,22	5,75	88,97	A	Memuaskan	83,32	80,35
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,95	6,81	90,76	A	Memuaskan	83,20	81,31
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	84,74	6,71	91,45	A	Memuaskan	84,35	81,94
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	81,34	6,91	88,25	A	Memuaskan	82,15	77,75
20	Dinas Perhubungan DIY	83,79	5,25	89,04	A	Memuaskan	81,56	78,3
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	85,39	4,80	90,19	A	Memuaskan	80,70	76,54
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,71	8,25	94,96	A	Memuaskan	84,66	82,18
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	86,42	6,17	92,59	A	Memuaskan	83,65	81,81
24	Dinas Kesehatan DIY	86,10	6,62	92,72	A	Memuaskan	84,26	83,17
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	76,32	6,10	82,42	A	Memuaskan	82,75	79,97
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	84,42	2,36	86,78	A	Memuaskan	82,74	81,13
27	Dinas Sosial DIY	86,13	7,00	93,13	A	Memuaskan	83,85	81,59
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,35	4,24	86,59	A	Memuaskan	81,84	76,58
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	84,43	5,52	89,95	A	Memuaskan	83,43	82,6
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,91	4,00	85,91	A	Memuaskan	80,81	77,27
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,11	7,32	95,43	A	Memuaskan	84,80	84,23

No	Unit Kerja	RB Gener al	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kate gori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	88,56	5,85	94,41	A	Memuaskan	82,73	75,73
33	Badan Kepegawaian Daerah DIY	90,47	4,10	94,57	A	Memuaskan	85,45	84,31
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	87,61	4,44	92,05	A	Memuaskan	84,63	82,44
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	83,74	4,97	88,71	A	Memuaskan	80,54	74,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82,20	3,65	85,85	A	Memuaskan	76,07	71,24
37	Badan Penghubung Daerah DIY	79,88	2,53	82,41	A	Memuaskan	81,69	76,51
Nilai Rata-Rata		84,24	5,66	89,90			82,87	80,02

Tabel III. 10 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 -60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan nilai rata-rata indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2022 82,87 menjadi 89,90 Pada Tahun 2023.

2. Terdapat peningkatan jumlah Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A) yaitu Tahun 2022 sejumlah 35 meningkat menjadi sejumlah 37 Perangkat Daerah pada Tahun 2023. jumlah Perangkat daerah berkategori "sangat baik" (A) adalah sebagai berikut:

Tabel III. 11 Jumlah Perangkat Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)

No	Kategori	Predikat	2023	2022	2021
1	AA	Sangat Memuaskan			
2	A	Memuaskan	37	35	22
3	A-	Memuaskan dengan catatan			
4	BB	Sangat baik		2	15
5	B	Baik			
6	CC	Cukup			
7	C	Kurang			
8	D	Sangat Kurang			

Kinerja sasaran 2 "Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada Perangkat Daerah" Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 12 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah <u>Meta Indikator:</u> Kategori RB	A	A atau 2	A atau 2 (Penilaian atas RB Tematik dan RB General oleh Biro Organisasi)	100% Persentase realisasi terhadap (target dibagi capaian dikalikan 100%) dengan metode invert	A atau 2	100% (Realisasi dibagi target akhir Renstra 2026 dikalikan 100%)

Keterangan:

Kategori nilai 1=AA, 2 = A, BB=3, 4 = B

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

- a. Tercapai 100%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (tercapai).
- a. Dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan kategori A atau 2, dapat dipertahankan dengan capaian kategori A atau 2.
- b. Capaian target indikator pada tahun 2023 mencerminkan capaian Tahun Akhir Perencanaan periode 2023-2026.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 13 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2


Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,91%	92,72%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian
1	2	3	4	5
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	100%	100%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%
		Pemeliharaan Mebel	100%	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	100%

Capaian tersebut didukung dari:

- a. Capaian Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya
Capaian nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan tahun 2023 sebesar 92,72% terealisasi 104,28% dari target yang ditetapkan sebesar 88,91%. Capaian tersebut diperkuat dengan penilaian Ombudsman RI kepada Dinas Kesehatan DIY terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan nilai 95,36 (kategori A dengan opini Kualitas Tertinggi).

Gambar III. 1 Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Tahun 2023

 <p style="text-align: center;">REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023</p> <p>Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023</p>						
No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input	Proses	Output	Pengaduan	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	19.59	29.46	21.97	18.88	89.90
2	Dinas Sosial	18.50	31.54	23.18	21.54	94.77
3	RS Paru Respira	20.69	31.11	22.21	21.54	95.55
4	Dinas Kesehatan	20.21	30.98	22.63	21.54	95.36
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.29	31.16	22.33	21.54	95.32
Nilai Akhir dan Zona		94.18				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Keterangan :

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Dokumen terbatas yang penggunaan dan publikasinya harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia

Faktor pendukung keberhasilan

- a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan cukup keleluasaan Dinas Kesehatan DIY dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- b. Peningkatan pemahaman dan komitmen dari pimpinan dan para pegawai Dinas Kesehatan DIY dalam mengimplementasikan Budaya Pemerintahan Satriya.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerja sama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana di Dinas Kesehatan DIY.

Faktor penghambat keberhasilan

- a. Implementasi budaya pemerintahan Satriya oleh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan DIY perlu ditingkatkan dan belum dilakukan monitoring evaluasi secara periodik.
- b. Kontinuitas penerapan budaya pemerintahan Satriya memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat agar dapat dilaksanakan secara konsisten.
- c. Sosialisasi penerapan nilai budaya pemerintahan Satriya belum dilaksanakan secara periodik.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya**1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dalam pelaksanaan SPM di DIY diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027. Capaian 2 (dua) Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan bagi Pemerintah Provinsi, adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14 Target dan Pencapaian SPM Kesehatan DIY Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	130	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0	100%	Setiap tahun

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan *road map* yang disepakati secara universal untuk menjembatani kondisi sosial dan ekonomi menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih baik. Permasalahan kesehatan dalam SDGs diintegrasikan ke dalam satu tujuan, yaitu tujuan nomor 3 (Kesehatan yang baik dan kesejahteraan) untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang dari segala usia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nomor 3, upaya yang dilakukan terakomodir melalui kegiatan-kegiatan di dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Capaian bidang kesehatan yang sesuai dengan Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya adalah:

- a. DIY merupakan provinsi yang memiliki tingkat pencapaian kinerja program imunisasi terbaik di Indonesia. Sejak tahun 2012, seluruh desa

(100%) yang ada di DIY telah masuk dalam kategori desa UCI (*Universal Coverage Immunization*). UCI adalah suatu indikasi yang menggambarkan bahwa 90% penduduk di desa tersebut telah menjalankan imunisasi. Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) tahun 2021 mencapai 97,25% tahun 2022 naik menjadi 97,6 dan tahun 2023 kembali naik mencapai 97,49%.

- b. Angka *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Pada tahun 2020 prevalensi sebesar 20,1% turun menjadi 17,3% pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 16,4% pada tahun 2022.
- c. Jumlah kasus kematian ibu di DIY tahun 2021 melonjak sebanyak 131 kasus sebagai dampak pandemi Covid-19, tahun 2022 kematian Ibu turun menjadi 43 kasus, dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 22 kasus.
- d. Kasus kematian bayi pada tahun 2021 sebanyak 270 kasus. Pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi 303 kasus, dan pada tahun 2023 turun menjadi 274 kasus.
- e. Kasus balita gizi kurang pada tahun 2022 terdapat 8.290 (5,20%), tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6.900 (4,52%).
- f. Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, yang masih menjadi permasalahan adalah persebarannya belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.
- g. Jaminan pembiayaan kesehatan telah menjangkau lebih 99% masyarakat di wilayah DIY.

Sebagaimana amanat *cascading* kinerja, Dinas Kesehatan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 15 Kontribusi Sasaran Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia 2. Tingkat Kemiskinan	81,07 10,74	81,09 11,04	100,02 % 97,28 %	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,35	106,06 %
2.	Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	WTP AA	WTP AA	100% 100%	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	A	A	100%

Penjelasan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui tiga dimensi dasar, salah satu dimensinya adalah umur panjang dan sehat yang dinilai dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH penduduk DIY konsisten berada di atas capaian nasional. Tahun 2023 capaian nasional sebesar 73,93 dan AHH penduduk DIY dari target yang ditetapkan sebesar 75,15 tercapai sebesar 75,18 atau 100,04%. Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, Dinas Kesehatan DIY melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan dengan target sasaran terwujudnya keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat.
2. Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan mengimplementasikan perbaikan Tata kelola Pemerintahan yang tergambarkan pada perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada kategori A. Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik (kualitas dampak pada tematik sebagaimana tertera pada PermenPAN nomor 9 dan KepmenPAN RB Nomor 739 tahun 2023.

3. Sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan juga diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan juga merupakan sebagai leading sektor RB tematik digitalisasi stunting sehingga berkontribusi signifikan terhadap capaian RB di level Pemda.

Tabel III. 16 Kontribusi Program Dinas Kesehatan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	75,15	75,18	100,04 %	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	93,1	96,4	104,12 %
		2. Total Fertility Rate (TFR)	1,89	1,81	104,4% <i>(invers)</i>	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	100%
					3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	3. Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	100%	
					4. Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	4. Terwujudnya peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	100%	100%	100%	
2	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Tinggi	Tinggi	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,23	92,72	104,29 %
		2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,43	86,67	99,13 %					

Penjelasan:

1. Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup di DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 75,04; dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi sebesar 75,08. Tahun 2023 Angka Harapan Hidup DIY sebesar 75,18. Pemda DIY akan terus berupaya untuk meningkatkan AHH dengan berbagai upaya antara lain: menekan angka kematian (ibu, bayi, balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit.
2. *Total Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya. TFR dihitung dari rata-rata jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama usia reproduksinya, yaitu umur 15 – 49 tahun. Semakin mendekati angka TFR 2,00 memperlihatkan bahwa penduduk tumbuh seimbang, atau mendekati ideal. TFR menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kependudukan DIY yang tercantum pada RPJMD DIY 2017-2022. Pada Tahun 2023 dari target 1,89 tercapai 1,81 atau terealisasi 104,4% (dengan menggunakan metode indikator *inverse*). Dukungan sektor kesehatan dalam rangka mempertahankan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk meningkatkan cakupan program keluarga berencana, upaya yang dilakukan antara lain: penyiapan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memberikan layanan Kesehatan reproduksi, edukasi kepada ibu hamil untuk mengikuti program KB pasca salin yang melekat di buku KIA sebagai amanat persalinan. Untuk meningkatkan cakupan KB pasca salin diterbitkan Surat Edaran Gubernur DIY nomor 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan di Wilayah DIY.
3. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggungjawab (*Good Governance*) diperlukan sinergitas program kegiatan lintas sektor perangkat daerah. Hasil capaian indikator diperoleh dari hasil evaluasi reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2023. Sinergitas dan koordinasi internal memperkuat komitmen Dinas Kesehatan DIY dalam mencapai target yang ditetapkan dalam melaksanakan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat. Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan memperoleh nilai 92,06 dengan katagori sangat baik pada survei kepuasan masyarakat terhadap 5 (jenis) pelayanan: layanan informasi publik, layanan pengaduan, legalisir STRTK dan STR Nakes, kegawatdaruratan PSC 199 DIY dan ujian kompetensi (UKOM) jabatan fungsional tenaga kesehatan. Dinas

Kesehatan juga meraih Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Publik Informatif.

Penghargaan

Beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2023, diantaranya :

1. Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi memperoleh penghargaan sebagai Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik di Provinsi DI Yogyakarta berupa PPKM AWARD 2023 dengan Predikat Laboratorium COVID dengan performa terbaik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Peringkat I Penggunaan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terbaik Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Peringkat II Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Atas Inisiatif dan Dedikasinya dalam Program VACCINE dan Trace dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Dinas Kesehatan DIY memperoleh penghargaan "*Health Financing Award*" dengan kategori Provincial Health Account Terbaik dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Publik INFORMATIF
7. Rumah Sakit Jiwa Grhasia UPT Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Publik INFORMA
8. Dinas Kesehatan DIY memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja Dekonsentrasi dengan Nilai Kerja Anggaran (NKA) tertinggi ketiga tahun 2023 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
9. Dinas Kesehatan DIY mendapatkan Peringkat Ketiga dalam Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2023 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
10. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Terbaik ke 3 Provinsi Dengan Pelibatan Fasyankes Swasta Terbaik Tahun 2023 dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

11. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan Kategori Indikator Surveilans Campak-Rubela Terbaik dari Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
12. RS Paru Respira UPT Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023
13. Dinas Kesehatan DIY memperoleh Penghargaan “Atas Peran Sertanya dalam membina Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perkantoran” dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
14. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkessos) mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya keluarga sehat	Indeks keluarga sehat	0,33	0,35	106,06	177.212.033.004,00	136.401.758.849,00	76,97%	40.810.274.155 (23,03%)
2	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	100%	202.124.978.450,00	144.747.381.844,20	71,61%	57.377.596.605,8 (28,39%)
Jumlah						382.087.549.154,00	283.756.976.586,20	74,26%	98.330.567,8 (25,74%)
Total Belanja Operasional						220.755.415.514,4	306.404.367.101,4	72,04%	85.648.951.587,4 (27,96%)

Sumber: <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Th 2023

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp

382.087.549.154,00, terealisasi Rp 283.756.976.586,20 atau 74,26% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp 98.330.567,8 atau 25,74% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi uang transportasi peserta pertemuan

Selain itu juga dilakukan rasionalisasi untuk anggaran pengadaan tanah RS Paru Respira, belanja reagen dan klaim jaminan pembiayaan kesehatan.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Penguatan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT)

Merupakan pengembangan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang lebih responsif, cepat, tepat dengan penggunaan aplikasi yang menyajikan persebaran fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur RS, kompetensi RS, kasus gawat darurat serta data ambulans yang bisa diakses oleh masyarakat. Aplikasi *Ambulance Tracing System* adalah suatu Aplikasi *mobile phone* yang dapat digunakan untuk mendukung layanan kegawatdaruratan medis, kegawatdaruratan maternal dan kehamilan serta kecelakaan lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Dinas Kesehatan DIY memiliki aplikasi <https://kesgadiy.web.id/> yang digunakan dalam pelaporan capaian pelayanan kesehatan keluarga. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis *website* yang dapat diakses oleh publik. Data hasil capaian yang tercantum pada aplikasi, diinput oleh petugas puskesmas maupun dinas kesehatan. Pada tahun 2023, dilakukan penambahan beberapa menu pada aplikasi, salah satunya penambahan menu *entry* capaian hasil pelayanan kesehatan usia produktif yaitu jumlah pasangan Calon Pengantin (catin) terdaftar di KUA atau lembaga lain, Catin dilayani kesehatan reproduksi,

Catin perempuan dengan anemia, dan Catin perempuan dengan kekurangan gizi.

- c. **Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan GeMa CerMat**
Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat yang dilaksanakan dengan upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan keterampilan masyarakat mengenai penggunaan obat secara rasional oleh *Agent of Change* (AoC) GeMa CerMat dan Kader GeMa CerMat.
- d. **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**
Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak (SIMKIA) adalah aplikasi berbasis *website* yang dikembangkan Dinas Kesehatan DIY untuk memudahkan pengelolaan data. Informasi yang ada dalam SIMKIA ini hampir sama dengan kohort ibu dan balita. Aplikasi SIMKIA dapat diakses melalui www.simundu.jogjaprov.go.id/kartini, untuk mengakses data bisa login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Akun yang terdaftar terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, dan Rumah Sakit.
- e. **Gendhis Manis (Gerakan Hidup Sehat Melawan Diabetes Mellitus)**
 - 1) Program pelayanan Diabetes Mellitus secara komprehensif mulai dari deteksi dini sampai rehabilitatif
 - 2) Meningkatkan akses untuk pelayanan Diabetes yang berkualitas dan inklusif
 - 3) Edukasi melalui Kulwap (Kuliah *Whatsapp*)
- f. **Mobile Screening (Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah)**
Aplikasi berbasis android, yang berfungsi menggantikan kegiatan penjaringan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh tenaga kesehatan, tergantikan dengan aplikasi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orangtua/siswa sehingga lebih cepat. Penghitungan penilaian dan rekapitulasi langsung otomatis dihitung melalui aplikasi dan masuk ke *website* penjarkes. Dapat diunduh melalui *Playstore* <https://penjarkes.jogjaprov.go.id>
- g. **Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan “One Student One Family” (OSOF)**
“One Student One Family” (OSOF) merupakan kegiatan berupa pendampingan mahasiswa yang melaksanakan magang, praktik kerja lapangan maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), pada tahap intervensi lanjut PISPK, dimana mahasiswa melakukan pendampingan terhadap keluarga sesuai dengan

permasalahan dalam keluarga berdasarkan 12 indikator PIS PK, antara lain: 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB); 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan; 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap; 4) Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur; 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok; 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Aplikasi e-STP (elektronik Surveilans Terpadu Penyakit) merupakan sistem informasi berbasis *online* untuk surveilans penyakit menular dan tidak menular yang dikembangkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan DIY. Aplikasi ini berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang dilaporkan bulanan oleh puskesmas dan rumah sakit. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan semua data surveilans yang dibutuhkan terutama untuk kewaspadaan dini, respon cepat maupun digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan program. Data penyakit menular maupun tidak menular yang dilaporkan dalam sistem informasi e-STP ini berupa data agregat dan difungsikan sebagai kewaspadaan dini dan respon cepat di lapangan. Penyakit menular potensial KLB /wabah diantaranya adalah PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi).

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Kesehatan DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2022 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Kesehatan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada masa pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 18 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Kesehatan DIY

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengembangan <i>/maintenance Aplikasi/Website</i>	Mendorong terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi	Dinas Kesehatan DIY	Kota Yogyakarta	Diskominfo	Memberi bantuan mengenai Fasilitasi <i>maintenance hosting</i> aplikasi	PAD
		Pengembangan Aplikasi <i>Electronic Medical Record (ERM)</i>	Mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih cepat dan akurat.	Pasien RS Paru Respira	Bantul	Diskominfo Dinas Dukcapil/Biro Tata Pemerintahan	Pemberian IP Public Pemberian akses data kependudukan	BLUD
		Pengembangan	Terkelolanya data	Penerima	Kota	Diskominfo	Fasilitasi <i>hosting dan domain</i>	
						Dinas Sosial Provinsi	Pengeloan data usulan layanan jamkesos	
						Dinas Sosial Kab/Kota	Pengeloan data usulan layanan jamkesos	
						Fasyankes pemberi layanan	Pengelolaan data klaim	
						Biro Tata Pemerintahan	Pemberian akses data kependudukan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi/Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelatihan dan Non Pelatihan yang diselenggarakan dari Jasa Layanan BLUD	Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dari Jasa Layanan BLUD	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	DIY	Semua OPD	Sebagai narasumber/fasilitator	Jasa Layanan BLUD
						Universitas	Sebagai narasumber/fasilitator	
						Rumah Sakit	Sebagai Narasumber/fasilitator dan tempat PKL	
						Pemerintah Kecamatan/Desa	Sebagai Nara Sumber dan wilayah tempat PKL	
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Meningkatkan kesejahteraan ASN	ASN	RS Jiwa Grhasia	BPKA	dukungan dana	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Bimtek Pangan Aman Sekolah (<i>Online</i>)	Mendorong terwujudnya pembinaan 30 sarana produksi dan distribusi makanan	Masyarakat	DIY	BBPOM	BBPOM menjadi narasumber;	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non fisik
		Sampling Makanan Jajan Anak Sekolah	Mendorong terwujudnya pembinaan 30 sarana produksi dan distribusi makanan	Masyarakat	DIY	Disdikpora	Disdikpora menjadi narasumber	
						Pengelola Kantin Sekolah	Pengelola kantin sekolah menjadi peserta	
						BBPOM	BBPOM menjadi mitra untuk konsultasi terkait hasil <i>sampling</i>	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non fisik
						BLKK	Pemeriksa hasil <i>sampling</i>	
						Disdikpora	Disdikpora terkait koordinasi dengan SMA/SMK lokasi <i>sampling</i>	
						Kantin di SMA/SMK	Penyedia <i>sample</i> makanan	
						DP3AP2	Narasumber program Sekolah Ramah Anak	
		Distribusi Obat dan perbekalan kesehatan	Mendorong terdistribusinya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan pada 5 kabupaten/kota	Masyarakat	DIY	Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota terkait koordinasi kebutuhan dan distribusi obat, perbekes dan vaksin	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non fisik
						Rumah Sakit Rujukan COVID 19	RS Rujukan COVID 19 terkait koordinasi kebutuhan dan distribusi obat, perbekes dan	
						BBPOM	BBPOM untuk pengawalan <i>cold chain</i> distribusi Vaksin	
		Pengadaan Ambulans Psikiatri	Meningkatkan pelayanan ke	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bappeda BPKA	- dukungan dana - dukungan kebijakan	DAK Fisik

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pengadaan Perlengkapan Alat Laboratorium	Dalam rangka pengembangan pelayanan di RS Jiwa Grhasia untuk memenuhi kebutuhan pasien, dengan harapan dapat meningkatkan kepuasan	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bappeda, BPKA, BLP, Diskominfo, Dinas Kesehatan	- dukungan dana - dukungan kebijakan	DAK Fisik
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Gladi kesiapsiagaan gawat darurat PSC 119	Mendorong terlaksananya SPM Bencana	Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan	Kota Yogyakarta	IDI (kolegium dokter emergensi medik)	<i>transfer knowledge</i> kesiapsiagaan medis gawat darurat	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Gladi tanggap bencana pada masyarakat berpotensi bencana	Mendorong terlaksananya SPM Bencana	Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan	Kota Yogyakarta	BPPD DIY	Dukungan fasilitasi tempat dan penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat/sasaran	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
							Penyediaan data wilayah dan masyarakat terdampak krisis kesehatan akibat bencana	
						Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dukungan fasilitasi tempat dan penyampaian informasi kegiatan kepada	
						Forkom Bencana	Dukungan fasilitasi tempat dan penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat/sasaran	
		Reviu PHCDP Puskesmas di wilayah terdampak atau berpotensi bencana	Mendorong terlaksananya SPM Bencana	Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan	Kota Yogyakarta	FKMK UGM	Fasilitator untuk pendampingan reviu PHCDP	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
						Badan Mutu	Identifikasi kesiapan PHCDP	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB/wabah	Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang tanggap pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Masyarakat	DIY	BBPOM, Balabkes DIY, BBTCLPP, BBVET Wates, B2P2VRP, Salatiga, Puslitbang, Kementerian Kesehatan	Melakukan pemeriksaan spesimen penyakit potensial KLB/wabah	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Penyelidikan Epidemiologi	Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang tanggap pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Masyarakat	DIY	BBTKLPP	Melakukan penyelidikan epidemiologi dan pengambilan sampel lingkungan penyakit potensial KLB/wabah	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
						FETP UGM	Melakukan penyelidikan epidemiologi ke lapangan	
		Kajian Penanggulangan KLB	Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang tanggap pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Masyarakat	DIY	FETP UGM	Melakukan kajian secara teori epidemiologi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
						KKP, Balabkes DIY, BBVET Wates, B2P2VRP, Salatiga, BBPOM	Melakukan kajian penanggulangan KLB	
		Audit Maternal Perinatal (AMP)	Mendorong terwujudnya penekanan angka tingkat kematian ibu	Masyarakat	DIY	POGI	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
						IDI	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	
						IDAI	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	
						PAPDI	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						IA Anastesi	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	
		Kajian Audit KIPI	Mendorong terwujudnya keamanan imunisasi dengan rendahnya tingkat	Masyarakat	DIY	Komda KIPI	Melakukan audit terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi dan mengeluarkan rekomendasi terhadap kasus	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
		Peningkatan Cakupan Imunisasi	Mendorong terwujudnya cakupan imunisasi bayi dan baduta di DIY	Masyarakat	DIY	MUI	Melakukan sosialisasi terkait kehalalan vaksin dan mendukung pelaksanaan imunisasi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
						PKK	Menggerakkan kader-kader di kecamatan dan desa untuk ikut membantu mendukung pelaksanaan vaksin hingga ke masyarakat	
						Camat dan jajarannya	Mendukung pelaksanaan imunisasi dengan membantu sosialisasi ke masyarakat	
		Manajemen Logistik Vaksin	Mendorong terpenuhinya vaksin di masyarakat	Masyarakat	DIY	BBPOM	Melakukan monitoring dan evaluasi penyimpanan dan pengiriman vaksin	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
		Monitoring Pelaksanaan BIAS	Mendorong terwujudnya imunisasi bagi anak dengan usia sekolah dasar	Masyarakat	DIY	Disdikpora	Berkoordinasi dengan sekolah2 yang dibawahinya untuk pelaksanaan imunisasi BIAS	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
						MUI	Memberikan sosialisasi terkait kehalalan vaksin	
		Pengelolaan <i>Website</i> Remaja	Mendorong terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	Masyarakat Usia Produktif	Kota Yogyakarta	Forum FKPKPR, DP3AP2, BKKBN, Dinas Sosial, PKBI	Pemberi data dan informasi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Validasi Data Kesehatan Keluarga Gizi Lansia	Mendorong terwujudnya Puskesmas santun lansia	Masyarakat Lansia	Kota Yogyakarta	Komda Lansia, Dinas Sosial, DP3AP2	Memberikan data mengenai jumlah lansia	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Rapat Tim Teknis Konvergensi <i>Stunting</i>	Mendorong terwujudnya penurunan angka <i>stunting</i> di DIY	Masyarakat	Kota Yogyakarta	PKK, BKKBN, Disdikpora, Bappeda, DPU ESDM, Dinas Sosial, DPKP, Biro Bermas, Biro Bintai, DP3AP2	Mendorong terwujudnya penurunan angka <i>stunting</i> di DIY	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting
		Riset Gizi	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau	Masyarakat	DIY	Institusi pendidikan Kesehatan	Melakukan kajian secara teori	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		<i>Workshop Aksi Konvergensi Stunting</i>	Mendorong terwujudnya penurunan angka <i>stunting</i> di DIY	Masyarakat	Kota Yogyakarta	PKK, BKKBN, Disdikpora, Bappeda, DPU ESDM, Dinas Sosial, DPKP, Biro Bermas, Biro Bintai, DP3AP2	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan <i>Stunting</i>
		Orientasi Kader STBM	Mendorong terwujudnya masyarakat yang berperilaku higienis dan sanitasi	Masyarakat	DIY	PKK DP3AP2 DLHK Biro Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat Fasilitasi pengelolaan limbah dan sampah Pemberdayaan masyarakat	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						MUI	Dana ZISWAF	
						Korem	Advokasi pada masyarakat	
						Kepolisian	Advokasi pada masyarakat	
						BPOM	Regulasi dan fasilitasi	
		Pembinaan penyelenggaraan KKS di Kab/Kota	Mendorong terwujudnya penyelenggaraan KKS	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
						PKK	Pengerakan mayarakat	
						Polda	Bina suasana	
		Pertemuan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pembinaan pengelolaan limbah medis difasyankes	Mendorong terwujudnya pengelolaan limbah medis di fasyankes	Masyarakat	DIY	BPTKL	Fasilitasi fisik	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
						DLHK	Regulasi dan fasilitasi	
						Rumah sakit	Pemenuhan regulasi	
						PERSI	Pengerakan Rumah Sakit	
						HAKLI	Peningkatan Kapasitas SDM	
						ARSSI	Pembinaan RS Swasta	
		Rapat Koordinasi Sosialisasi Germas di Desa	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Semua OPD	mendukung dan menyetujui rencana pelaksanaan Germas di desa, Hadir dalam Undangan Rapat Koordinasi.	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
							Menedukasi masyarakat untuk hidup sehat	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Analisis hasil PIS-PK terintegrasi di tingkat provinsi (<i>webinar</i>)	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	PKK, DP3AP2, Biro Bermas	Penyampaian informasi kepada sasaran/keluarga dan mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayahnya	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Germas Advokasi Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Adanya dukungan Kebijakan Germas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Germas Forum Tingkat Provinsi	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Adanya tim Forum Komunikasi Germas di masing-masing OPD	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Kesga Gizi FGD Pendampingan Pelaksanaan Surveilans Gizi oleh Kab./Kota dan Puskesmas	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Adanya tim Forum Komunikasi Germas di masing-masing OPD	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Kesga Gizi Pertemuan Audit Maternal Neonatal (AMP)	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	POGI, IDI, IDAI, PAPDI, IA Anastesi	Memberikan edukasi dan informasi mengenai ibu dan bayi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Kesga Gizi <i>Workshop</i> Penilaian Aksi Konvergensi	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	PKK BKKBN Disdikpora Bappeda DPU ESDM Dinas Sosial DPKP Biro Bermas Biro Bintal	Memberikan edukasi hidup sehat	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Kesehatan Kerja dan Olah Raga melalui pengukuran kebugaran jasmani ASN	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk	Masyarakat	DIY	UNY BKD Balai Pendidikan Olah Raga (BPO) DIY	Pemberian materi, kebugaran ASN melaksanakan Koordinasi dengan ASN DIY untuk dilakukan tes Kebugaran Fasilitasi tempat pelaksanaan pengukuran	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Kesling evaluasi limbah medis fasyankes	Mendorong terwujudnya kondisi di	Masyarakat	DIY	BPTKL DLHK Rumah sakit	Fasilitasi fisik Regulasi dan fasilitasi Pemenuhan regulasi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Kesling HSP	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	PERSI	Pengerakan Rumah Sakit	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						HAKLI	Peningkatan Kapasitas SDM	
						ARSSI	Pembinaan RS Swasta	
						ARSADA	Pembinaan RS Daerah	
						Disperindag	pembinaan industri skala rumah tangga	
		Kesling Rakor STBM	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat	Masyarakat	DIY	BBPOM	Pembinaan penyehatan makanan kemasan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Dis Kop dan UKM	Pembinaan industri makanan skala makro	
						PPJI	Pemenuhan persyaratan jasa boga	
						PHRI	Pemenuhan persyaratan hotel	
						PKK	Penilaian lingkungan bersih	
		Kesling <i>Workshop</i> Limbah Medis Berbasis Wilayah	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	DP3AP2	Fasilitasi tempat pelaksanaan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						MUI	Kontri busi Dana ZISWAF	
						PUPESDM	Sanitasi pemukiman	
						Biro PIWPP	Infrastruktur sanitasi	
						Pokja PPAS	Sinergi kegiatan dan	
						DLHK	Pembinaan pengelolaan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						UGM	Kajian model pengelolaan limbah berbasis wilayah	
						Biro Bintai	kajian kesehatan masyarakat Dalam pengolahan B3	
						DisPentaru	Pemanfaatan tataruang untuk pengelolaan limbah	
						Biro PIWPP	Monev dan pelaporan limbah RS	
						DLHK	Monev dan pelaporan limbah RS	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Penguatan Desa Siaga Aktif	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	PKK	Melaksanakan sosialisasi program vaksin dan penerapan “ <i>gawe jogja ijo</i> ” serta memotivasi pelaksanaan germas di wilayah kerjanya	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Pertemuan Koordinasi Terintegrasi LP LS	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Ormas	Melaksanakan sosialisasi	
						Semua OPD	Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Sosialisasi Germas di Desa	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan Germas pada diri sendiri dan lingkungannya	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Kesehatan kerja dan olah raga melalui pengukuran kebugaran jasmani ASN	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	UNY	Pemberian materi, kebugaran ASN	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						BKD	melaksanakan Koordinasi dengan ASN DIY untuk dilakukan tes Kebugaran	
						Balai Pendidikan Olah Raga (BPO) DIY	Fasilitasi tempat pelaksanaan pengukuran	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri TOGA/Akupresur Perlengkapan Penghargaan (<i>Trophy</i>)	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	PKK, Perguruan Tinggi, Asosiasi Akupresur, Dinas Pertanian, Tokoh Masyarakat	Membina dan mengevaluasi kegiatan Asmantoga dan Akupresur	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Publikasi Master Film ILM	Mendorong terwujudnya kondisi di masyarakat yang dengan sadar, mau dan mampu berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan memadukan nilai-nilai kearifan lokal	Masyarakat	DIY	Diskominfo	Menyebarkan konten ILM melalui media informasi umum	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Humas Setda DIY	Menyebarkan konten ILM melalui media informasi Humas	
						Korem 072 Pamungkas	Menyebarkan konten ILM melalui media informasi Korem dan melalui unit kesatuan di bawahnya	
						Polda DIY	Menyebarkan konten ILM melalui media informasi umum dan melalui unit kerja	
						PKK	Menyebarkan konten ILM melalui media informasi umum dan melalui unit PKK di bawahnya (tingkat	
						Kwarda Pramuka	Menyebarkan konten ILM melalui media informasi umum dan melalui unit Pramuka di bawahnya (Kwarcab/kwarcam)	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						Semua OPD	Penyebarluasan konten ILM dan pesan-pesan kesehatan oleh karyawan	
		Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Covid-19 Tingkat Provinsi	Pencegahan dan penanggulangan Covid-19	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Menyebarluaskan Informasi tentang vaksin melalui media informasi umum	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Humas Setda DIY	Menyebarluaskan informasi vaksinasi melalui media informasi Humas	
						Korem 072 Pamungkas	Menyebarluaskan informasi vaksinasi melalui unit kesatuan di bawahnya (Koramil/Babinsa)	
						Polda DIY	Menyebarluaskan informasi vaksinasi melalui media informasi umum dan melalui unit kerja di bawahnya	
						PKK	Menyebarluaskan informasi vaksinasi melalui media informasi umum dan melalui unit PKK di bawahnya (tingkat kecamatan/ desa)	
						Kwarda Pramuka	Menyebarluaskan informasi vaksinasi melalui media informasi umum dan melalui unit Pramuka di bawahnya (Kwarcab/kwarcam)	
						Semua OPD	Penyebarluasan informasi vaksinasi dan pesan-pesan kesehatan oleh karyawan	
		Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan	Pencegahan dan penanggulangan	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Mencegah dan menanggulangi Covid-19	Pajak Rokok - Pelayanan
		Koordinasi Pencegahan dan	Pencegahan dan penanggulangan	Masyarakat	DIY	Semua OPD	Mencegah dan menanggulangi Covid-19	Pajak Rokok - Pelayanan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Akselerasi Menuju Eliminasi Malaria	Mencegah terjadinya kasus penularan setempat malaria	Masyarakat	DIY	Pemerintah Desa	Mendukung dalam sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk eliminasi malaria di Kabupaten Kulon Progo	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Dinas Pariwisata	Sosialisasi dan fasilitasi kewaspadaan malaria di tempat wisata pada daerah endemis, pemakaian kelambu pada <i>homestay</i> di wilayah Kokap	
						Bappeda	Memfasilitasi penganggaran malaria yang dibutuhkan	
						Dinas Pertanian	Membudidayakan tanaman pengusir nyamuk dan mensosialisasikan ke masyarakat	
						PKK	penggerakan kader untuk pelaksana Dusun Peduli Malaria	
		Bimtek Kader P2P Kampus Sehat	Mendorong terwujudnya kampus sehat	Masyarakat	DIY	Dikpora	Memberikan kebijakan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di institusi pendidikan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Universitas	Menyediakan sarana dan prasarana untuk deteksi dini pada civitas akademika dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	
		Institusi Sejahtera	Mendorong terwujudnya institusi sejahtera	Masyarakat	DIY	Sekretariat Daerah	Mendukung terbentuknya institusi sejahtera untuk Instansi di DIY	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						Psikologi UGM	Mendukung penyebaran mahasiswa yang akan melakukan praktik lapangan di institusi sehingga mampu mendampingi kesehatan jiwa anggota institusi	
						BKD	Membuat peraturan atau sistem kepegawaian yang dapat diimplementasikan pada institusi sejahtera	
						Biro Bintal	Menerbitkan SK untuk instansi yang sudah mampu menerapkan insitusi sejahtera	
						Bappeda	Memfasilitasi penganggaran untuk pembentukan institusi sejahtera	
		Persiapan Kampus Sehat	Mendorong terwujudnya kampus sehat	Masyarakat	DIY	Disdikpora	Memberikan kebijakan terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular di institusi pendidikan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Universitas	Menyediakan sarana dan prasarana untuk deteksi dini pada civitas akademika dalam pencegahan dan pegendalian penyakit menular dan tidak menular	
		persiapan pembentukan <i>One Health</i>	Mendorong terwujudnya pembentukan <i>one health</i>	Masyarakat	DIY	Dinas pertanian	pengawasan lalu lintas ternak dalam pencegahan masuknya hewan potensial penyakit zoonosis	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik -
		Revitalisasi TPKJM		Masyarakat	DIY	Biro Bintal	Menerbitkan SK terkait dengan TPKJM Provinsi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						Polda	Penanggulangan Masalah Psikososial (Gepeng, Anak jalanan, LGBT, KDRT, Tawuran, Bencana, NAPZA)	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						DP3AP2	Pemberdayaan keluarga terintegrasi dengan kesehatan jiwa, KIE. Peningkatan ketahanan Keluarga melalui deteksi dini gangguan jiwa. Peningkatan Kualitas Lingkungan keluarga fisik dan non fisik.	
						Dinas Sosial	Penguatan <i>shelter</i> sosial untuk ODGJ di tingkat provinsi	
		Pengembangan Layanan Tata laksana Pneumonia di RS	Mencegah terjadinya kasus penularan setempat pneumonia	Masyarakat	DIY	Rumah Sakit	Mencegah, mengobati dan memberikan edukasi tentang penyakit pneumonia	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		Rapat kerja pembinaan pencegahan <i>fraud</i> di RS	Mendorong FKTL yang bebas dari <i>fraud</i>	FKTL	Kota Yogyakarta	PERSI, BPJS, BMPK	Memberikan edukasi mengenai <i>fraud</i>	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Rapat kerja pembinaan RS untuk pemenuhan standar jaminan kesehatan	Mendorong RS untuk memenuhi standar jaminan kesehatan	FKTL	Kota Yogyakarta	BPJS, PERSI, Dinas Kesehatan Kab/Kota	Memberikan informasi mengenai standar jaminan kesehatan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Penguatan Surveilans Aktif Rumah Sakit		Masyarakat	DIY	Rumah Sakit	Mengedukasi surveilans rumah sakit	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
		<i>Workshop</i> Petugas Surveilans dan Laboratorium Rumah		Masyarakat	DIY	Rumah Sakit	Mengedukasi surveilans rumah sakit dan laboratorium	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
		Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Klinik		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	Asosiasi Klinik, Dinas Kesehatan Kab/Kota	Fasilitasi penyampaian informasi kepada sasaran/klinik, mendorong anggotanya untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan standar	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Peningkatan kapasitas tata kelola RS		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	BPRS, PERSI, FKMK UGM	Fasilitasi penyampaian informasi kepada RS dan mendorong anggotanya untuk memenuhi ketentuan tata kelola RS	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Rapat survei efektivitas intervensi lanjut PIS PK		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	Badan Mutu	fasilitasi pengumpulan data untuk identifikasi efektifitas intervensi lanjut PIS PK	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Sosialisasi Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (<i>Webinar</i>)		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	Asosiasi Klinik Dinas Kesehatan Kab/Kota	fasilitasi penyampaian informasi kepada sasaran/klinik, mendorong anggotanya untuk memenuhi SPA klinik sesuai standar	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana pada Klinik di daerah rawan bencana		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	FKMK UGM, BPBD	fasilitator untuk pendampingan sosialisasi kesiapsiagaan bencana pada klinik di daerah rawan bencana	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Tim Pelaksana Kegiatan BPRS DIY		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	BPRS, PERSI, FKMK UGM, Lembaga Biro Hukum	Fasilitasi pendampingan pelaksanaan pengawasan non teknis RS	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		<i>Webinar</i> pelayanan laboratorium		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	Dinas Kesehatan Kab/Kota, PATELK, FKMK UGM	Fasilitasi pendampingan pelaksanaan pelayanan laboratorium sesuai standar	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		<i>Webinar</i> peningkatan pelayanan unggulan Rumah Sakit		Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota Yogyakarta	FKMK UGM, PERSI	Fasilitasi peningkatan pelayanan unggulan RS	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
		Pembiayaan Klaim Jaminan Kesehatan Penyangga, Preventif dan Rehabilitatif	Adanya jaminan kesehatan penyangga, preventif dan	Fasilitas Layanan Kesehatan, Mitra Bapel Jamkessos,	DIY	Dinas Sosial DIY, Kab/Kota	Dukungan dari Dinas Sosial berupa Surat Rekomendasi untuk Penerbitan SEP (Surat Eligibilitas Peserta)	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						KPAD DIY	Dukungan dari KPAD DIY terkait surat rekomendasi untuk penerbitan SEP bagi pasien ODHA	
						DP3AP2	Dukungan dari DP3AP2 terkait rekomendasi surat keterangan dari FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak)	
						PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia)	Dukungan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) terkait Posbindu Disabilitas	
						CSR, LSM, NGO (Rotary Club, PKPU, LAZIS, Ohana, UCP, Yakkum, PMI, TAGANA,	Dukungan dari CSR, LSM, NGO (Rotary Club, PKPU, LAZIS, Ohana, UCP, Yakkum, PMI, TAGANA, Karang taruna dll) terkait pelaksanaan Jamkesus Terpadu	
						LAPAS	Dukungan dari LAPAS terkait surat keterangan penghuni LAPAS bagi masyarakat miskin yang membutuhkan SEP untuk penjaminan ke RS	
						Puskesmas	Dukungan dari Dinas Sosial, Puskesmas, Kecamatan, TKS, Kepolisian/Polsek, TNI/Koramil, terkait pelaksanaan Jamkesus Terpadu	
						WKCP dan SAPDA	WKCP dan SAPDA terkait pelaksanaan pemeriksaan TORCH terkait <i>supporting</i> penyandang disabilitas DIY	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait surat rekomendasi untuk penerbitan SEP bagi pasien KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	
						Dukungan dari Mitra Alat Bantu (UCP, Yakkum, Audiotone, Argomulyo)	Dukungan dari Mitra Alat Bantu (UCP, Yakkum, Audiotone, Argomulyo) untuk penyediaan alat bantu bagi peserta penyandang disabilitas	
						PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan : RS, Puskesmas, Dokter keluarga, Bidan Mandiri Swasta)	PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan: RS, Puskesmas, Dokter keluarga, Bidan Mandiri Swasta) yang telah melakukan MOU dengan Bapel Jamkessos terkait pemberian pelayanan kesehatan	
						LSM	Dukungan dari LSM untuk pendampingan pasien ODHA dan untuk gelandangan dengan kasus kejiwaan	
		Penyediaan kantong darah	Kebutuhan transfusi darah pada pasien dapat tersedia setiap saat	Pasien Rawat inap RSP Respira	Bantul	PMI	Penyediaan darah untuk transfusi	BLUD
		Integrasi SIMRS Terpadu		Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bappeda, BPKA, BLP, Diskominfo Dinas Kesehatan	- Dukungan dana - koordinasi dalam penyusunan SIMRS terpadu - dukungan kebijakan	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pembangunan gedung CSSD	Memenuhi standar dalam akreditasi RS untuk ruangan sterilisasi alat	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bappeda, BPKA, BLP, Dinas Kesehatan	- dukungan dana - dukungan kebijakan	APBD
		Pemenuhan Alat Sterilisasi dan Instalasi CSSD	Memenuhi standar dalam akreditasi RS untuk ruangan sterilisasi alat	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bappeda, BPKA, BLP, Dinas Kesehatan	- dukungan dana - dukungan kebijakan	APBD
		Pemenuhan Alat Kesehatan Ruang HCU	Memenuhi standar dalam akreditasi RS untuk ruangan HCU	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bappeda, BPKA, BLP, Dinas Kesehatan	- dukungan dana - dukungan kebijakan	APBD
		Penyusunan Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pengembangan Pelayanan Non Jiwa RSJ Grhasia	Sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah dan pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana pengembangan pelayanan yang dibuat, serta memberi informasi kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana kegiatan	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman	Konsultasi dan koordinasi dalam Penyusunan Dokumen AMDAL	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pembangunan gedung Visum dan layanan visum	Memenuhi standar pelayanan visum psikiatri di RS Jiwa Grhasia, meningkatkan akses layanan visum psikiatri kasus pidana, korban tindak pidana, maupun perdata ke RS Jiwa Grhasia, sebagai bagian dari fungsi layanan kesehatan jiwa di RS Jiwa Grhasia sebagai RS Pemerintah	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan, DP3AP2, Bapeljamkesos, Dinas Sosial	- Dukungan dana - RS Jiwa Grhasia menjadi salah satu rujukan kasus visum untuk korban tindak pidana dan perawatan bagi korban (dengan catatan yang memerlukan tim multidisiplin profesi, perlu koordinasi lebih lanjut jika ada SDM yang tidak tersedia di RS Jiwa Grhasia) - Dukungan penjaminan pembiayaan dari Bapeljamkessos untuk kasus visum psikiatri	APBD
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Mendorong terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	Dinas Kesehatan DIY	Kota Yogyakarta	Diskominfo	Mengelola informasi dan data	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat/ Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>webinar</i> bimbingan teknis pelaksanaan mutu dan akreditasi klinik pratama	Mendorong terwujudnya klinik pratama yang bermutu dan terakreditasi	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	ASKLIN, BMPK	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		<i>webinar</i> koordinasi tentang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dasar	Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terakreditasi	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	BMPK, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas	Sebagai Narasumber, Menerapkan Standar Mutu dan Akreditasi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		<i>webinar</i> pementapan mutu eksternal	Mendorong terwujudnya eksternal yang bermutu	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	PATELKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						ILKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	
		<i>webinar</i> peningkatan kapasitas tentang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan dasar	Mendorong terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan terakreditasi	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	BMPK, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas	Sebagai Narasumber, Menerapkan Standar Mutu dan Akreditasi	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		<i>webinar</i> sosialisasi indikator mutu rumah sakit	Mendorong terwujudnya rumah sakit yang bermutu	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	PERSI, Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan	Sebagai Narasumber, Menerapkan Standar Mutu dan Akreditasi RS	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
		<i>webinar</i> sosialisasi pedoman dan instrumen akreditasi laboratorium	Mendorong terwujudnya laboratorium yang terakreditasi	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	PATELKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						ILKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	
		Pembinaan Kapasitas Labkesda Paska Akreditasi	Mendorong terwujudnya Labkesda yang terakreditasi	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	PATELKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						ILKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	
		pertemuan pembinaan labkesda	Mendorong terwujudnya pembinaan labkesda	Klinik pratama, Laboratorium, Puskesmas, dan RS di DIY	DIY	PATELKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
						ILKI	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						Dinas Kesehatan Kab./Kota	Sebagai Narasumber, menyosialisasikan kepada anggota	
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan/Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia KesehatanTingkat Daerah Provinsi	Perizinan dan Pembinaan Pemenuhan Standar Tenaga dan Sarana Kesehatan	Mendorong terwujudnya perizinan dan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana kesehatan	FKTL dan FKTP di DIY	DIY	PERSI, Organisasi Profesi, Asosiasi Lab Klinik, Gakeslab, BLKK, BMPK, Dinas Kesehatan Kab./Kota, Perijinan Kab./Kota	Membimbing dan mengedukasi tenaga dan sarana kesehatan agar mendapat perizinan	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PIDI	Mendorong terwujudnya pelaksanaan PIDI	FKTL dan FKTP di DIY	DIY			Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan, DID
		Pengembangan Aplikasi/Website	Mendorong terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	Dinas Kesehatan DIY	Kab. Sleman	Diskominfo	Sistem Informasi EPP dan AKD <i>online</i>	APBD
		Penyusunan Grand Design Laboratorium Lapangan	Mendorong terwujudnya laboratorium lapangan baik instansi maupun masyarakat yang mendukung pengembangan kompetensi tenaga kesehatan	Stakeholder pelatihan: Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas, Kecamatan, dan Desa	DIY	Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa	Memberikan data-data dan masukan rancangan pengembangan laboratorium Memberikan data-data dan masukan rancangan pengembangan laboratorium lapangan yang dapat mensinergikan kebutuhan institusi pelatihan dan kebutuhan instansi/desa yang menjadi laboratorium lapangan	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pengembangan Sistem Pembelajaran Yang mendukung sistem	Mendorong terwujudnya sistem pembelajaran berupa <i>learning management system</i> dengan fitur yang lengkap sesuai kebutuhan pembelajaran	Peserta pelatihan, Pengajar , dan pengendali pelatihan	DIY	Universitas	Memberi masukan dan bimbingan dalam menyusun desain pengembangan <i>learning management system</i> dan membantu mengkorvesikan kebutuhan pembelajaran menjadi bahasa informasi dan teknologi	APBD
						Puslat BPPSDM Kesehatan	Memberi masukan dan mengatur regulasi tentang pengaturan metode pembelajaran	
		Pertemuan secara daring untuk temu pelanggan eksternal	Mendorong terwujudnya komunikasi yang efektif dengan pelanggan Bapelkes	Mitra /Pelanggan	DIY	BKPP	Memberikan masukan pelayanan yang masih kurang dan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pelanggan, serta memberikan inspirasi pelayanan yang perlu dikembangkan	
						LSM	Memberikan masukan pelayanan yang masih kurang dan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pelanggan, serta memberikan inspirasi pelayanan yang perlu dikembangkan	
						Masyarakat	Memberikan masukan pelayanan yang masih kurang dan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pelanggan, serta memberikan inspirasi pelayanan yang perlu dikembangkan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pelatihan Komunikasi Efektif Bagi Tenaga Kesehatan	Meningkatkan kompetensi dalam berkomunikasi secara efektif bagi tenaga kesehatan	Petugas kesehatan terpilih dari Dinkes/UPT/RS Pemd DIY	DIY	Diskominfo DIY, Lembaga /Provider	Memberikan materi dan informasi terkini untuk peningkatan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) kepada peserta latih sebagai narasumber	APBD
		Pelatihan tim Penilai Jabatan Fungsional Update versi PermenPAN RI Nomor: 13 Tahun 2019	Meningkatkan kompetensi tim penilai jabatan fungsional kesehatan	Pengampu JFK ; BKD /BKPP Kab./Kota dan peserta pengampu Tim Penilai JFK dan BKPP/BKD	DIY	Badan Kepegawaian Nasional/ Daerah, Kementerian Kesehatan RI, Organisasi Profesi Kesehatan	Memberikan materi dan informasi terkini untuk peningkatan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) kepada peserta latih sebagai narasumber dan peserta	APBD
		Workshop bagi masyarakat untuk mewujudkan desa siaga	Meningkatkan kemampuan membuat tahapan-tahapan untuk mewujudkan desa siaga	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	DIY	Dinas Kesehatan Kab./Kota, Puskesmas LSM/Ormas Dinsos Pemerintah Kecamatan/ Desa, BPBD	- Memberikan materi dan informasi serta akses fasilitasi bagi RTL peserta dalam bentuk bimtek berkesinambungan, dukungan regulasi, dukungan sistem serta pengiriman peserta dan narasumber - Memberikan materi dan informasi terkini untuk peningkatan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) kepada peserta latih sebagai pendamping, narasumber dan fasilitator	APBD
		Workshop integrasi penyusunan SKP dan Angka Kredit bagi pengampu jabatan fungsional kesehatan	Mendorong terwujudnya tim penilai jabatan fungsional kesehatan yang <i>update</i> dan mampu menjawab	Tenaga Kesehatan dan Masyarakat	DIY	Badan Kepegawaian Nasional/ Daerah	Memberikan materi dan informasi terkini untuk peningkatan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) kepada peserta latih sebagai narasumber dan peserta	APBD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						Biro Organisasi Setda DIY	Memberikan materi dan informasi terkini untuk peningkatan kompetensi (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) kepada peserta latih sebagai narasumber	
7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman/ Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Bimbingan Teknis Pembinaan UKOT	Mendorong terwujudnya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional	Produsen dan Distributor Obat Tradisional	DIY	Pemilik Sarana (PJT) UKOT, Asosiasi Pengusaha UKOT, Dinas Kesehatan Kab./Kota, Dinas Perijinan Kab./Kota	Melatih dan memberikan pembinaan bagi pelaku UKOT	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan
8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan/	Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional	Mendorong pengembangan kesehatan tradisional	Obat Tradisional/ Herbal	DIY	Akademisi	Memberikan masukan tentang kajian obat tradisional/herbal	Dana Keistimewaan DIY
		Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal	Penyehat Tradisional Terlatih Jamu/Herbal	Penyehat Tradisional	DIY	Asosiasi Hatra	Sebagai Narasumber, Menyosialisasikan kepada anggota	Dana Keistimewaan DIY
		Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi	Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi	Penyehat Tradisional	DIY	Asosiasi Hatra	Sebagai Narasumber, Menyosialisasikan kepada anggota	Dana Keistimewaan DIY
		Penyehat Tradisional Mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan	Penyehat Tradisional	DIY	Asosiasi Hatra	Sebagai Narasumber, Menyosialisasikan kepada anggota	Dana Keistimewaan DIY
		Perawat RS dan Puskesmas terlatih akupresur	Perawat RS dan Puskesmas terlatih akupresur	Perawat RS dan Puskesmas	DIY	Asosiasi Akupresur	Sebagai Narasumber, Menyosialisasikan kepada anggota	Dana Keistimewaan DIY

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Workshop Saintifikasi Jamu	Merumuskan Desain Jamu	Asosiasi Jamu, Produsen/penggiat jamu	DIY	Biro Bina Mental, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Asosiasi Jamu	Sebagai Narasumber, Menyosialisasikan kepada anggota	Dana Keistimewaan DIY
		Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T Saintifikasi Jamu, Penggalangan Komitmen hatra dan layanan Kestrad)	Asosiasi Hatra, SP3T, Saintifikasi Jamu, Komitmen hatra dalam layanan kestrad	Penyehat Tradisional, SP3T, Produsen Jamu	DIY	Dinas Kesehatan Kab./Kota, Asosiasi Hatra	Sebagai Narasumber, Menyosialisasikan kepada anggota	Dana Keistimewaan DIY
		Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional dan Konsultasi Teknis Kestrad	Kebijakan kesehatan tradisional tersosialisasi kepada penyehat tradisional	Penyehat Tradisional	DIY	Kementerian Kesehatan, Asosiasi Hatra	Sebagai Narasumber	Dana Keistimewaan DIY
		Pengembangan Yankestrad di Tempat Wisata	Yankestrad berkembang pada tempat wisata	Masyarakat di sekitar tempat wisata	DIY	Dinas Pariwisata DIY, Dinas Pariwisata Kab/Kota	Sebagai Narasumber	Dana Keistimewaan DIY
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kampanye Peningkatan Kesehatan Jiwa	Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan, DP3AP2, Dinas Sosial Disnakertrans, Diskominfo, Satpol PP, Bappeda, BPKA	Dukungan untuk intervensi program <i>screening</i> gangguan jiwa pada masyarakat	BLUD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pekan Olah raga dan Kesenian Rehabilitasi Mental (PORKESREMEN)	Upaya mempromosikan kesehatan jiwa ke masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan jiwa, mengurangi stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa dan orang dengan gangguan kesehatan jiwa (ODGJ)	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan, Asek III, BPKA, Bappeda	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
		Screening (Pemetaan) Gangguan Jiwa	Upaya mempromosikan kesehatan jiwa ke masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan jiwa, mengurangi stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa dan orang dengan gangguan kesehatan jiwa (ODGJ)	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan, Disdikpora, Disnakertrans, Bappeda, BPKA	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
		Kartu Pencari Kerja untuk ODGJ	Mengurangi stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa	Pasien	RS Jiwa Grhasia	Dinas Sosial, Disnakertrans, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Pelatihan Kerja untuk ODGJ	Meningkatkan kemampuan ODGJ agar dapat bersaing dengan pencari kerja yang lain	Pasien	RS Jiwa Grhasia	Dinas Sosial, Disdikpora (BLPT) Disnakertrans (BLK), Bappeda, BPKA	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
		Pelatihan <i>Screening</i> Kesehatan Jiwa untuk Tenaga Non Medis	Upaya mempromosikan kesehatan jiwa ke masyarakat melalui peningkatan pemahaman kesehatan jiwa, mengurangi stigma masyarakat tentang kesehatan jiwa dan orang dengan gangguan kesehatan jiwa (ODGJ)	Tenaga Non Medis	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan, DP3AP2	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
		Peningkatan Pelayanan <i>Community Health Service</i>	Upaya untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat melalui upaya preventif dengan pemberian edukasi dan informasi mengenai kesehatan jiwa kepada masyarakat	Tenaga Medis	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Kesehatan Kab/Kota, DP3AP2	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
		Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kesehatan Jiwa	Menjaring ide dan pendapat masyarakat untuk peningkatan layanan di RS Jiwa Grhasia	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Kesehatan	Dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
						DP3AP2	dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	
						Dinas Sosial	dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		Penyusunan <i>Master Plan</i> RS	Sebagai dokumen perencanaan pengembangan pelayanan di RS Jiwa Grhasia selama 20 tahun, sehingga perencanaan kebijakan dapat lebih terarah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Rumah Sakit Jiwa Grhasia	RS Jiwa Grhasia	Bappeda	dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	BLUD
						BPKA	dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	
						LSM kesehatan jiwa	dukungan dalam intervensi kebijakan kesehatan	
						Dinas Kesehatan	dukungan dalam koordinasi dalam penyusunan <i>master plan</i>	
						Bappeda	dukungan dalam koordinasi dalam penyusunan <i>master plan</i>	
						BPKA	dukungan dalam koordinasi dalam penyusunan <i>master plan</i>	
		Survei Verifikasi Akreditasi	Mendorong terwujudnya pelayanan rumah sakit yang bermutu	Masyarakat dan <i>civitas hospitalia</i>	RS Jiwa Grhasia	Rumah Sakit	Dukungan untuk kelancaran kegiatan survei akreditasi	BLUD
						Perguruan Tinggi Jejaring	Dukungan untuk kelancaran kegiatan survei akreditasi	
		Survei Kepuasan Masyarakat	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan sebagai bahan umpan balik perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan layanan	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Rumah Sakit	Dukungan untuk berpartisipasi dalam penetapan Standar Pelayanan	BLUD
						Institusi Pendidikan	Dukungan untuk berpartisipasi dalam penetapan Standar Pelayanan	
						Dinas Sosial	Dukungan untuk berpartisipasi dalam penetapan Standar Pelayanan	
						Panti	Dukungan untuk berpartisipasi dalam penetapan Standar Pelayanan	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
						Tokoh Masyarakat	Dukungan untuk berpartisipasi dalam penetapan Standar Pelayanan	
		Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kemenag Sleman tentang Pelayanan Rohaniawan	Memberikan asuhan kepada pasien dengan menghargai agama, keyakinan, dan nilai-nilai pribadi pasien	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Kemenag Sleman	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan Bapeljamkessos DIY tentang Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan bagi penerima manfaat Jamkesta DIY	Memberikan jaminan pelayanan kesehatan, mengendalikan mutu pelayanan dan mengendalikan pembiayaan pelayanan kesehatan di FKTL	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Bapeljamkessos	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan Dinkes Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Jamkesda Bantul	Memberikan pelayanan kesehatan, dan mengendalikan mutu pelayanan dan mutu pembiayaan pelayanan kesehatan di PPK II dan PPK III	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinkes Kabupaten Bantul	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		PKS dengan Dinkes Kota Yogyakarta tentang Pelayanan SPGDT Psikiatri dalam kegiatan SPGDT PSC 119 YES	Mengurangi risiko keparahan, cacatan, kematian korban/pasien, dan untuk menangani kondisi akut yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain dengan kegawatdaruratan psikiatri	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinkes Kota Yogyakarta	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan Dinkes Kabupaten Sleman tentang Pelayanan SPGDT dalam kegiatan SES	mengurangi risiko keparahan, cacatan, kematian korban/pasien, dan untuk menangani kondisi akut yang mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain dengan kegawatdaruratan	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinkes Kabupaten Sleman	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan Dinsos DIY tentang pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengobatan medis fasyankes	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	Dinas Sosial	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
						BRSBKL DIY	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	AKTIVITAS	TUJUAN	SASARAN	LOKASI	DUKUNGAN LINTAS SEKTOR YANG DIBUTUHKAN		SUMBER DANA
						LINTAS SEKTOR	BENTUK DUKUNGAN	
		PKS dengan RSK Puri Nirmala tentang Pelayanan fasilitas kesehatan jiwa tingkat lanjut	Menjamin pelayanan kesehatan jiwa tingkat lanjut kepada pasien, perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	RSK Puri Nirmala	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan RSUD Sleman tentang Pelayanan rujukan	Mendorong tercapainya pelayanan kesehatan jiwa dan menurunnya angka gangguan jiwa	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	RSUD Sleman	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan RSUP dr Sardjito	Mendorong tercapainya pelayanan kesehatan jiwa dan menurunnya angka gangguan jiwa	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	RSUP dr. Sardjito	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD
		PKS dengan RS Panti Rahayu tentang Pelayanan rujukan pasien	Menjamin pelayanan kesehatan jiwa tingkat lanjut kepada pasien, perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan	Masyarakat	RS Jiwa Grhasia	RS Panti Rahayu	Dukungan untuk kelancaran pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	BLUD

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

3.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 2 (dua) sasaran yang ada, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) indikator yang telah melampaui 100% dari target yang telah ditetapkan dan ada 1 (satu) indikator yang mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

1. Hambatan permasalahan kinerja (dapat diidentifikasi dari faktor *man, money, material, method, machine*; faktor proses manajemen: *planning, organizing, actuating, controlling*; faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis yang ada selama ini berjalan.

a. Faktor *man*

Berdasarkan data SDM Dinas Kesehatan dan UPT, jumlah keseluruhan pegawai Dinas Kesehatan dan UPT sebanyak 627 orang. Tingkat pendidikan didominasi S1 sebanyak 257 orang (41%), disusul jenjang D3 sebanyak 227 orang (36,2%), jenjang S2 sebanyak 91 orang (14,51%) dan hanya 37 orang (6%) berpendidikan SMA. Komposisi pegawai perempuan lebih mendominasi dengan jumlah 425 orang (67,78%) dibandingkan jumlah pegawai laki-laki sebesar 202 orang (32,21%). Masih terdapat kekurangan SDM yang sesuai kualifikasi untuk mengisi formasi yang tersedia.

b. Faktor *money*

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada tahun 2023 Anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp 382.087.549.154,00 dan terealisasi Rp 283.756.976.586,20 (74,26%) dengan realisasi fisik 100%.

c. Faktor Material

Untuk mendukung operasional kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT memiliki Kendaraan dinas terdiri dari yakni 4 (empat) unit kendaraan dinas jabatan, 33 (tiga puluh tiga) unit kendaraan operasional, 1 (satu) unit bus, 9 (sembilan) unit kendaraan khusus (ambulans) 2 (unit) kendaraan khusus (mobil jenazah) dan 38 (tiga puluh delapan) unit kendaraan roda dua. Ruang kantor umum meliputi

ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang aula, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi dan toilet telah tersedia. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lainnya sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer* atau *laptop* dibandingkan dengan jumlah pegawai mendekati rasio 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana prasarana sudah memadai.

d. Faktor *Method*

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Kesehatan DIY telah berkomitmen memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemda DIY. Skema kinerja dilaksanakan melalui hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi.

e. Faktor *Machine*

Penunjang dalam mencapai kinerja telah didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang cukup memadai. Adanya keterbatasan dapat diatasi dengan optimalisasi sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan DIY.

f. Faktor proses manajemen

1) *Planning*

Proses perencanaan program dan anggaran Dinas Kesehatan DIY melalui proses dan tahapan berikut ini:

- a) Sinkronisasi dokumen Renstra, Renja, dan DPA
- b) Penyusunan Perjanjian Kinerja (SKP)
- c) Sinkronisasi kinerja bawahan dengan kinerja atasan
- d) *Refocusing*, pergeseran, perubahan APBD
- e) Keterlibatan pimpinan dalam siklus SAKIP
- f) Aplikasi DinkesPlan dan GermasPlan

2) *Organizing*

Dalam pelaksanaan program kegiatan, anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kesehatan berpedoman pada regulasi dan perencanaan yang telah ditetapkan di dalam rencana strategis (renstra).

3) *Actuating*

Dalam pelaksanaan program kegiatan, Dinas Kesehatan DIY didukung kepemimpinan yang efektif, adanya motivasi kerja, koordinasi dan

komunikasi melalui rapat rutin bulanan untuk membahas aktivitas harian dan kegiatan program.

4) *Controlling*

Evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) Menindaklanjuti Rekomendasi LHE SAKIP yang diterbitkan Inspektorat
- b) Pemantauan pengendalian pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan inovasi
- c) Koordinasi dan monitoring evaluasi internal penyiapan data kinerja untuk *desk Monitoring* evaluasi timbal balik rapat koordinasi pengendalian (Rakordal) triwulan oleh Bappeda dengan pendekatan *Balance Score Card* (BSC)
- d) Tindak lanjut hasil Rakordal untuk perbaikan kinerja organisasi dan kinerja individu, dapat dilakukan melalui pembinaan

5) Faktor *stakeholder* eksternal atau faktor proses bisnis

Reviu Peta Proses Bisnis dilakukan Dinas Kesehatan DIY untuk menelaraskan/menyesuaikan dengan regulasi dan renstra terkini.

2. Faktor kunci keberhasilan

- a. Adanya pembinaan secara berkala melalui *briefing* dan rapat eselon yang dilakukan pimpinan serta memberikan arahan, masukan, ide gagasan inovatif untuk percepatan pelayanan dan pelaksanaan program kegiatan.
- b. Memperkuat koordinasi dan sinergitas dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat/pertemuan untuk membahas ketercapaian rencana aksi dan melakukan upaya perbaikan secara berjenjang dan melalui kunjungan lapangan untuk melakukan pemantauan pengendalian secara langsung.

3.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengawal pencapaian *output* organisasi dengan pemantauan dan pengendalian secara umum maupun khusus pada unit kerja yang berisiko tinggi tidak tercapai.
2. Mengawal pencapaian *outcome* dan IKU organisasi dengan pemantauan dan pengendalian secara umum maupun khusus pada unit kerja yang berisiko tinggi tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Memperbaiki pengumpulan data, manajemen data, perencanaan, penganggaran dan capaian, baik secara manual maupun penggunaan aplikasi agar program kegiatan terlaksana secara efektif dan efisien.
4. Memperbaiki manajemen evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mengimplementasikan SOP yang telah disusun.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			214.742.253.288		189.443.152.186		109.402.523.044		374.720.045.646		324.995.253.119		1.297.181.999.525
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	52,67%	735.503.000	55,73%	838.163.000	59,54%	885.979.000	63,35%	937.577.000	67,18%	998.335.000	67,18%	4.695.870.500

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	65,6%	13.090.600	84,4%	134.423.000	86,1%	149.987.000	87,7%	162.551.000	90,2%	181.485.000	90,2%	687.297.800
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	n/a	0	100%	524.345.000	100%	576.779.500	100%	634.457.500	100%	697.903.000	100%	2.433.485.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan sub kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	n/a	0	0,35%	19.33.695.000	0,95%	28.587.383.000	2,11%	19.693.730.000	6,30%	116.139.657.900	6,30%	183.757.465.900
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	20%	389.855.000	20%	420.350.000	40%	2.740.786.000	40%	1.014.864.000	60%	1.100.000.000	60%	6.198.221.000
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,91 %	151.131.048.671	89,06 %	158.033.778.677	89,21%	240.433.854.971	89,36%	209.157.325.893	89,51 %	185.803.442.701	89,51 %	1.105.709.111.006

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Awal



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA 55165

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN DIY.




drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Persen (%)	0.33	Triwulan I	0.30
					Triwulan II	0.31
					Triwulan III	0.32
					Triwulan IV	0.33
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 214.742.253.288
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 735.503.000
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 13.090.600
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp 389.855.000

No	Program RPD	Anggaran
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 151.131.048.680
	Jumlah Anggaran	Rp 367.011.750.568

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
- Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen Rp 10.462.224.000

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN DIY,

drg. PEMERINTAH SETYANINGASTUTIE, M.Kes.

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦱꦺꦴꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjapro.go.id, Email : dinkes@jogjapro.go.id
YOGYAKARTA 55165

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
Gubernur
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN DIY,

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Persen (%)	0.33	Triwulan I	0.30
					Triwulan II	0.31
					Triwulan III	0.32
					Triwulan IV	0.33
2.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 113.336.698.017
2.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 1.805.700.800
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 13.090.600
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 476.677.300

No	Program RPD	Anggaran
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rp 455.069.000
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 78.202.346.229
	Jumlah Anggaran	Rp 194.289.581.946

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
- Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan dan JKN, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Program Dukungan Manajemen Rp 8.444.993.000

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
SUBBAGIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X



PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN DIY,
drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M. Kes.



Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website: <http://inspektorat.jogjaprov.go.id> e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 15-3-2023

Nomor : 700/01079
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Perangkat
Daerah pada Dinas Kesehatan
DIY Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Keputusan ... $\frac{1}{2}$

- f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 064/II/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran ...

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana kerja Dinas;
- 2) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 3) penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 4) penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- 5) penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- 6) pengelolaan sumber daya kesehatan;
- 7) pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- 8) pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- 9) pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- 11) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 12) pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 13) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- 14) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan DIY terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Kelompok Substansi Program; dan
 - 3) Kelompok Substansi Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Kesehatan Khusus; dan

2) Seksi ... *f*

- 2) Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Standardisasi Tenaga dan Sarana Kesehatan; dan
 - 2) Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Jabatan fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Kesehatan DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Kesehatan DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Kesehatan DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan DIY yaitu :
 - 1) Aplikasi SANGGA RATU (Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu) yaitu aplikasi yang memberikan informasi persebaran fasilitas kesehatan, ketersediaan bed RS, Kompetensi RS, Kasus Gawat Darurat, serta Ambulance yang bisa diakses oleh masyarakat;

2). GENDHIS....f)

- 2) GENDHIS MANIS (Gerakan Hidup Sehat Melawan Diabetes Mellitus) yaitu pelayanan kepada masyarakat, dengan fokus memberikan program layanan kepada masyarakat terkait dengan penanganan kesehatan, pemeriksaan komprehensif, cegah dini, edukasi, dan pelayanan lain yang terkait dengan penyakit Diabetes Mellitus;
- 3) Aplikasi Mobile Screening (Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah) yaitu aplikasi berbasis android, yang berfungsi menggantikan kegiatan penjaringan kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh tenaga kesehatan, tergantikan dengan aplikasi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh orang tua/siswa sehingga lebih cepat. Penghitungan penilaian dan rekapitulasi langsung otomatis dihitung melalui aplikasi yang masuk ke web penjarkes. Dapat diunduh melalui *playstore* <https://penjarkes.jogjaprov.go.id>
- 4) Media komunikasi kesehatan bagi difabel, yaitu media komunikasi dalam bentuk leaflet dan aplikasi di *playstore* sebagai alat komunikasi bagi tenaga kesehatan dan penyandang tuna rungu dalam pelayanan kesehatan. Media dalam bentuk video iklan layanan masyarakat (ILM) dengan ditampilkan teks kalimat yang disampaikan serta dengan menampilkan juru bahasa isyarat (JBI). Video ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi yang terkait dengan kesehatan khususnya bagi masyarakat difabel tuna rungu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan DIY telah menindaklanjuti dengan:

- a. Mengawal pencapaian output organisasi dengan pemantauan dan pengendalian secara umum maupun khusus pada unit kerja yang berisiko tinggi tidak tercapai;
- b. Mengawal capaian outcome dan IKU Organisasi dengan pemantauan dan pengendalian secara umum maupun khusus pada unit kerja yang berisiko tinggi tidak tercapai;
- c. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data secara manual maupun aplikasi;
- d. Mendorong RS Paru Respira untuk segera menyelesaikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang SPM;
- e. Memperbaiki manajemen evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan mengimplementasikan SOP yang telah disusun;

f. Memperbaiki ... 4

- f. Memperbaiki manajemen data perencanaan, penganggaran dan capaian baik secara manual maupun aplikasi.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kesehatan DIY memperoleh nilai sebesar 86,25. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,50 atau 88,33% dari bobot sebesar 30%;
- Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,80 atau 79,33% dari bobot sebesar 30%;
- Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,45 atau 89,67% dari bobot sebesar 15%;
- Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 22,50 atau 90,00% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY agar:

- Meningkatkan peran serta seluruh pegawai Dinas Kesehatan DIY agar memahami dan lebih peduli atas hasil pengukuran kinerja, sehingga pada aspek pengukuran kinerja, khususnya yang terkait dengan peran serta segenap pegawai Dinas Kesehatan DIY untuk memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dapat dipertahankan nilainya pada kesempatan mendatang, bahkan dapat lebih ditingkatkan;
- Meningkatkan koordinasi internal dan koordinasi lintas sektor sehingga capaian sasaran/kinerja organisasi menjadi lebih baik.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan DIY memperoleh nilai 86,25. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.


2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya

sasaran ... 1,


Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Kesehatan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc. 17.

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta


Lampiran 4. Penghargaan yang diraih Dinas Kesehatan DIY Tahun 2023


NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHU NPEMBERIAN PENGHARGAAN	SKALA (NASIONAL/ INTERNASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM/PIALA
1	Piagam Penghargaan Laboratorium BLKK Yogyakarta Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik di Provinsi DI Yogyakarta	20 Maret 2023	Menteri Kesehatan RI	Terbaik	PPKM AWARD- Predikat Laboratorium COVID dengan performa terbaik	 <p>The image shows a yellow certificate with a decorative border. At the top center is the Garuda Pancasila emblem. Below it, the text reads: 'PIAGAM PENGHARGAAN' in large bold letters, followed by 'DIBERIKAN KEPADA:' in smaller letters. The recipient is 'Laboratorium BLKK Yogyakarta' and the reason is 'Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik di Provinsi DI Yogyakarta'. The award is 'PPKM AWARD 2023'. At the bottom, it is dated 'Maret, 20 Maret 2023' and signed by 'Menteri Kesehatan' with a signature and the name 'BUDI C. SAUDIN'.</p>

2	Penghargaan Penggunaan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terbaik Tahun 2022	27 Maret 2023	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peringkat I	Penggunaan Antibiotik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terbaik Tahun 2022	 <p>Dipindai dengan CamScanner</p>
---	---	---------------	--	-------------	---	---

3	Penghargaan Peringkat II Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022	27 Maret 2023	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peringkat II	Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022	 <p>DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN mendukung penghargaan kepada DINAS KESEHATAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA</p> <p>sebagai Peringkat II Pelayanan Kefarmasian Terbaik Tahun 2022</p> <p>Jakarta, 27 Maret 2023</p> <p>DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Dr. Drs. Saiful Bika Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS.</p> <p>Dipindai dengan CamScanner</p>
4	Piagam Penghargaan Dinas Kesehatan DIY atas Inisiatif dan Dedikasinya dalam Program Vaccine dan Trace	26 Juni 2023	Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		Penghargaan Atas Inisiatif dan Dedikasinya dalam Program Vaccine dan Trace	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN Diberikan kepada: DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA Atas Inisiatif dan Dedikasinya dalam Program VACCINE & TRACE</p> <p>Jakarta, 26 Juni 2023</p> <p>John Leigh AIRC Program Director</p> <p>Imran Pambudi, MPHIM Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p> <p>Selma Patta Sumburg CEO Save the Children Indonesia</p>

5	Penghargaan <i>Health Financing Award</i> Dinas Kesehatan DIY Kategori <i>Provincial Health Account</i> Terbaik	29 Agustus 2023	Menteri Kesehatan RI	Terbaik (Peringkat I)	Penghargaan <i>Health Financing Award</i> Kategori <i>Provincial Health Account</i> Terbaik	
6	Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Publik INFORMATIF	21 September 2023	Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta		Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY sebagai Badan Publik INFORMATIF	

7	Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sebagai Badan Publik INFORMATIF	21 September 2023	Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta		Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2023 kategori OPD Pemerintah Daerah DIY Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY sebagai Badan Publik INFORMATIF	
---	--	-------------------	---	--	---	---

8	Penghargaan Unit Kerja Dekonsentrasi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tertinggi ke 3 tahun 2022	10 November 2023	Menteri Kesehatan RI		Unit Kerja Dekonsentrasi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tertinggi ke 3 tahun 2022	
---	--	------------------	----------------------	--	--	---

9	Penghargaan Pemeringkatan Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2023	11 November 2023	Menteri Kesehatan RI	Peringkat III	Pemeringkatan Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2023	 <p>MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>memberikan</p> <p>TANDA PENGHARGAAN</p> <p>kepada :</p> <p>Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>sebagai</p> <p>Peringkat Ketiga Pemeringkatan Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2023</p> <p>Jakarta, 11 November 2023 MENTERI KESEHATAN</p> <p> BUDI G. SADIKIN</p>
---	---	------------------	-------------------------	---------------	---	---

10	Piagam Penghargaan Terbaik 3 Provinsi Dengan Pelibatan Fasyankes Swasta Terbaik Tahun 2023	November 2023	Menteri Kesehatan RI	Terbaik III	Provinsi dengan Pelibatan Fasyankes Swasta Terbaik Tahun 2023	 <p>PIAGAM PENGHARGAAN diberikan kepada: TERBAIK 3 : DINAS KESEHATAN PROVINSI DI YOGYAKARTA sebagai PROVINSI DENGAN PELIBATAN FASYANKES SWASTA TERBAIK TAHUN 2023 disampaikan pada Pertemuan Koordinasi Penyusunan Laporan Implementasi PPM dan Peningkatan Kapasitas TO PPM Provinsi Wilayah Prioritas, 27 November - 1 Desember 2023, secara luring, Jakarta, November 2023</p>  dr. Imran Pambudi, MPHIM Direktur P2PTM, Kementerian RI
11	Sertifikat Penghargaan Provinsi DIY Kategori Indikator Surveilans Campak-Rubela Terbaik Tahun 2022	November 2023	Menteri Kesehatan RI		Penghargaan Kategori Indikator Surveilans Campak-Rubela Terbaik Tahun 2022	 <p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA: Nomor: IM.81.03/C.IV/4383/2023 <i>Provinsi DI Yogyakarta</i> KATEGORI Indikator Surveilans Campak-Rubela Terbaik Tahun 2022</p>  dr. Prima Josephine, MKM Direktur Pengelolaan Imunisasi

12	Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023	21 November 2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Rumah Sakit Paru Respira Pemerintah Provinsi DIY sebagai Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023	
13	Penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial UPT Dinas Kesehatan	27 November 2023	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	

14	Penghargaan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Atas peran sertanya dalam membina Program GP2SP dan K3 Perkantoran	12 Desember 2023	Menteri Kesehatan RI		Peran serta dalam membina Program Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Perkantoran	
15	Penghargaan Penganugerahan Predikat Tahun 2023 oleh Ombudsman Republik Indonesia	14 Desember 2023	Ombudsman Republik Indonesia	Kualitas Tertinggi (Zona Hijau)	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik)	



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

